

Pengantar

Raporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah / lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 berikut realisasinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).

Hasil penilaian yang terdapat dalam laporan kinerja 2017 ini diharapkan dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholder dan menjadi dasar perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di tahun mendatang.

Padang, 30 Desember 2017
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDLI A.P. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001

Ringkasan Eksekutif



elama tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di tingkat korporat tahun 2017 adalah sebesar 140,55% yang diperoleh dari rata-rata capaian kinerja keseluruhan, dengan rujukan hasil penilaian kinerja dapat diilustrasikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
▪ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100,00
▪ Persentase			
- Capaian Realisasi Fisik dan	100%	100%	100,00
- Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	95%	96,02%	101,07
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			100,36
SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Realisasi Investasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
▪ Nilai Realisasi Investasi:			
PMA (ribu USD)	48.102,73	194.425.20	404,19
PMDN (juta Rp.)	3.379.046,35	1.516.964.30	44,89
▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan	22 %	43,15%	196,14
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			215,07
SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	80 %	80,04 %	100,05
▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	3,3	3,23	97,88
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			98,97
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan			138,19

Cat: 1 US \$ = Rp. 13.400,-

Capaian kinerja sasaran pada sasaran I sebesar 100,54%, capaian sasaran II sebesar 215,07%, dan capaian sasaran ketiga sebesar 98,97%. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan pada ketiga sasaran tersebut, hampir semua indikator mencapai target kecuali Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMDN dan indikator Kinerja IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu untuk Nilai Realisasi PMDN dari target sebesar Rp. 3.379.046,35 juta terealisasi sebesar Rp. 1.516.964,30 juta atau sebesar 44,89% dan Kinerja IKM dari target sebesar 3,3 terealisasi sebesar 3,23 atau sebesar 98,97%

Sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi** dengan dua indikator, yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat melampaui target kinerja yang ditetapkan. Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dicapai dengan nilai "B" dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari target realisasi fisik sebesar 100% terealisasi sebesar 100% atau sebesar 100% dan target keuangan sebesar 95% terealisasi sebesar 96,02% atau 101,07%.

Sasaran strategis **meningkatnya Realisasi investasi di Sumatera Barat**, dicapai melalui penambahan realisasi investasi PMA maupun PMDN, pada tahun 2017 dapat dicapai bahkan melebihi target. Realisasi investasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.121.964.300.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 4.023.622.932.000,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,47% atau Rp. 99.638.748.000,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 2.605.297.680.000 dan PMDN sebesar Rp. 1.517.964.300.000,-. Realisasi PMA didominasi pada sektor Pertambangan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 167.625,- ribu atau sebesar 86,22% kemudian disusul oleh sektor Listrik, Gas dan Air dengan realisasi investasi sebesar US\$ 10.057,60 ribu atau sebesar 5,17%, sektor Hotel dan Restoran dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.989,60 ribu atau sebesar 2,05%, sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.842,9 ribu atau sebesar 1,98% dan sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 4.313,20 ribu atau sebesar 2,22%. Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha didominasi oleh sektor Industri Logam, Mesin dan Elektronika dengan realisasi investasi sebesar Rp. 648.675,10 juta atau sebesar 42,76%, kemudian disusul oleh sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 234.019,40 juta atau sebesar 15,43%, sektor Listrik, Gas dan Air dengan realisasi investasi sebesar Rp. 151.275,40 juta atau sebesar 9,97%, sektor Pertambangan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 96.107,90

juta atau sebesar 6,34%, dan sektor Peternakan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 95.071,90 juta atau sebesar 6,27%.

Berdasarkan lokasi realisasi PMA Tahun 2017, investasi PMA terbesar terletak di Kab. Solok Selatan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 167.093,20 ribu pada sektor Pembangkitan Tenaga Listrik, kemudian disusul Kab. Tanah Datar dengan realisasi investasi sebesar US\$ 9.364,90 ribu pada sektor Pembangkitan Tenaga Listrik, Kota Padang dengan realisasi investasi sebesar US\$ 4.442,20 ribu pada sektor industri karet, Perdagangan Besar, Wisata Tirta, , Kab. Kep. Mentawai dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.869,80 ribu pada sektor Penyediaan Jasa Akomodasi dan Kab. Dharmasraya dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.528,20 ribu pada sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan realisasi PMDN tahun 2017 berdasarkan lokasi, pertama di Kota Padang dengan realisasi investasi sebesar Rp. 713.291,80 juta kemudian disusul oleh Kab. Padang Pariaman dengan realisasi Investasi sebesar Rp. 174.733,40 juta, Kab. Agam dengan realisasi investasi sebesar 173.892,10 juta, Kab. Pasaman Barat dengan realisasi investasi sebesar Rp. 170.773,90 jutadan Kb. Sijunjung dengan realisasi investasi sebesar Rp. 88.033,40 juta.

Berdasarkan asal negara (5 besar) adalah didominasi oleh Negara Jepang dengan realisasi Investasi PMA sebesar US\$ 166.933,70 ribu atau 85,86%, kemudian disusul oleh negara Singapura dengan realisasi Investasi PMA sebesar US\$ 13.631,60 ribu atau 7,01%, Negara Seychelles dengan realisasi Investasi PMA sebesar US\$ 3.528,40 ribu atau 1,81%, negara Australia dengan realisasi Investasi PMA sebesar US\$ 3.131,40 ribu atau 1,61%, negara Malaysia dengan realisasi Investasi PMA sebesar US\$ 2.747,10 atau 1,41% dan negara Brazil dengan realisasi Investasi PMA sebesar US\$ 1.134,40 ribu atau 0,58%.

Pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran strategis kedua yakni persentase izin penanaman modal yang direalisasikan untuk tahun 2017 dari target 22% atas persentase izin penanaman modal yang direalisasikan dapat terealisasi sebesar 43,15% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 215,75%. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2016, dari jumlah izin prinsip PMA dan izin prinsip PMDN yang merealisasikan kegiatannya dibandingkan dengan izin prinsip PMA dan izin prinsip PMDN yang masih berlaku capaian kinerja sebesar 27,44%, capaian kinerja pada tahun 2017 sangat jauh peningkatannya yaitu sebesar 43,15% dengan kata lain ada kenaikan sebesar 157,25%

Sasaran strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu** dicapai melalui persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu belum dapat

dipenuhi, tingkat capaian sebesar 100%. Jumlah perizinan/non perizinan bidang penanaman modal yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 2.119 izin / non izin prinsip penanaman modal PMDN. Perizinan PMA merupakan kewenangan pemerintah pusat diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 13 (tiga belas) izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 11 (sebelas) izin dapat diselesaikan tepat waktu proses sesuai dengan SOP dan 2 (dua) izin prinsip Penanaman Modal tidak dapat diselesaikan sesuai dengan SOP disebabkan karena 1. Belum adanya penegasan kewenangan perizinan Penanaman Modal antara pusat dengan pemerintah provinsi; 2. Pemahaman pelaku usaha tentang pengisian form pendaftaran; 3. Waktu pengembalian form pendaftaran yang lambat dikembalikan oleh pelaku usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2017 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan *Surveillance Sertifikasi manajemen mutu ISO SNI 9001:2008* oleh Lembaga Sertifikasi *PT. ASRicert Internasional Indonesia* yang hasilnya diterima pada tanggal 29 September 2017 dan akan ditingkat menjadi ISO SNI 9001:2015 di tahun 2018. Diharapkan nantinya kinerja terhadap pelayanan guna mencapai pelayanan prima yaitu pelayanan cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Anggaran DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.382.080.537,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.598.354.129,- (94,90%). Realisasi anggaran tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.313.730.585,- atau 76,21% dari realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 8.234.683.544,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2017 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2016 dimana serapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 93,73 % atau naik sebanyak 1,17%.

Pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan karena adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran DPM&PTSP untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Diperlukan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* didalam meningkatkan penanaman modal. Selain itu juga perlu adanya optimalisasi

pencapaian kinerja pada indikator "*persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu*" dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan perizinan kepada investor, menambah SDM, melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi dan meningkatkan komunikasi dengan BKPM RI terkait SPIPISE. Disamping itu juga pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Sumatera Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal.

Daftar Isi

	Halaman
PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021	6
B. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	11
B. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	56
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	72
2. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	73
3. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2017 DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	74
4. Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	76
5. Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2017	79
6. Izin Prinsip PMA Yang Berlokasi di Sumatera Barat Tahun 2017	85
7. Izin Prinsip PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Negara Asal Tahun 2017	88
8. Izin Prinsip PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2017	91
9. Izin Prinsip PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Lokasi Tahun 2017	94

10. Izin Prinsip PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Perusahaan Tahun 2017.	97
11. Izin Prinsip PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Lokasi Tahun 2017	100
12. Izin Prinsip PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2017	106

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	9
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017	11
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis Pertama	14
Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis Kedua	17
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Penambahan Realisasi PMA dan PMDN	20
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Penambahan Realisasi PMA dan PMDN (target renstra 2016-2021)	21
Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2011-2017	53
Tabel 3.7. Daftar Perizinan dan non perizinan sektor Penanaman Modal yang diterbitkan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.	54
Tabel 3.8. Rekapitulasi Perizinan dan non perizinan sektor yang diterbitkan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.	56
Tabel 3.9. Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2017	58
Tabel 3.10. Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2017	59
Tabel 3.11. Nilai Rata-Rata Unsur Penilaian	60
Tabel 3.12. Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	61
Tabel 3.13. Capaian Realisasi IKM dibandingkan Target Tahun 2015 – 2017	62
Tabel 3.14. Rekapitulasi Perizinan PMA/PMDN Tahun 2017 (Lokasi Proyek di Sumatera Barat)	63

Daftar Grafik

	Halaman	
Grafik 3.1	Realisasi Fisik Program dan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	15
Grafik 3.2	Realisasi Keuangan Program dan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	16
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2011-2017	19
Grafik 3.4	Perkembangan Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2011-2017	20
Grafik 3.5	Kontribusi Sektor Terhadap Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2017	22
Grafik 3.6	Kontribusi Sektor Terhadap Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2017	23
Grafik 3.7	Penyebaran Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2017	24
Grafik 3.8	Penyebaran Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2017	25
Grafik 3.9	Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Pada PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2017	26
Grafik 3.10	Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Pada PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2017	27
Grafik 3.11	Realisasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Sumatera Barat Tahun 2017	28

Daftar Singkatan

No.	Singkatan	Penjelasan
1	DPM&PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
3	PMA	Penanaman Modal Asing
4	LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
5	APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
6	APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Daftar Lampiran

Uraian	Penjelasan	Halaman
Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	56
Lampiran 2	Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Renstra DPM & PTSP Sumatera Barat Tahun 2016-2021	57
Lampiran 3	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat Tahun 2017	59
Lampiran 4	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Barat Tahun 2017	61
Lampiran 5	Rekapitulasi Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rekapitulasi Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Barat Menurut Sektor Tahun 2017	64
Lampiran 6	Daftar Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) Lokasi Proyek di Sumatera Barat Tahun 2017	65
Lampiran 7	Daftar Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Lokasi Proyek di Sumatera Barat Tahun 2017	69
Lampiran 8	Daftar Calon Investor Yang Berminat Menanamkan Modalnya di Sumatera Barat Tahun 2017 Perjanjian Kinerja SKPD Perjanjian kinerja Eselon III dan IV	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM



alah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain "kegiatan investasi" akan memberikan *multiplier effects*. Penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah

mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah menetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Dua diantara misi tersebut (misi kedua dan keempat) adalah "*Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional*" dan "*Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah*". Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Mengacu pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang dalam bidang penanaman modal adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan sasaran "meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu" dan mewujudkan iklim investasi dengan sasaran "meningkatnya investasi daerah" sebagai prioritas yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun (jangka menengah). Gubernur Sumatera Barat telah memberikan tugas pokok kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017, tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daeran dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

B. ORGANISASI DPM & PTSP



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan daerah di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari;
 - Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 - Seksi Pemberdayaan Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari;
 - Seksi Pelayanan Perizinan I;
 - Seksi Pelayanan Perizinan II;
 - Seksi Pelayanan Non Perizinan.

g. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:

- Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan dalam Lampiran 1.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daeran dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha pencapaian target rencana jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Rencana strategis memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2016-2021 berikut target yang akan dicapai. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan adanya perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 perubahan dengan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor **050/30/BKPM&PPT-2016** tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul dan Berdayasaing”.

2. Misi

- a. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat; dan
- b. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga; dan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

4. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021. Disamping itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Matriks Renstra selengkapnya terdapat pada lampiran 2.

B. PENETAPAN KINERJA



Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Tahun 2017 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga capaian kinerja tahun 2017 tersebut mencerminkan capaian tahun kedua dari renstra 2016-2021. Perubahan dokumen perencanaan juga terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana sebelumnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Perubahan atas dokumen perencanaan dimulai dari Cascading, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah mulai dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada dan telah ditandatangani "Perjanjian Kinerja Tahun 2017" pada bulan Oktober 2017. Sasaran Strategis yang terdapat di Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang telah disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	• Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
	• Persentase Capaian Kinerja - Realisasi Fisik dan - Capaian Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100% 95%
Meningkatnya Realisasi Investasi	▪ Nilai Realisasi Investasi: PMA (ribu USD)	48.102,73
	PMDN (juta rupiah)	3.379.046,35
	▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan	22 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu	▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	80 %
	▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	3,3

Sumber : Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021

Pada tahun 2017, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang didukung oleh program kerja prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Ketiga sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi, merupakan belanja pokok dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset SKPD;
2. Meningkatkan Realisasi Investasi, merupakan belanja urusan dengan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Satu Pintu, merupakan belanja urusan dengan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

Untuk mewujudkan capaian target kinerja yang sudah ditetapkan di tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan didukung anggaran sebesar Rp. 9.943.804.900,- (Sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat ribu Sembilan ratus rupiah) untuk belanja urusan dengan 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan, dimana kedua program tersebut adalah:

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan targetnya. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya \geq **85%** dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan 6 (enam) indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS I			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
▪ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100,00
▪ Persentase Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan			
- Capaian Realisasi Fisik dan	100%	100,00	100,00
- Capaian Realisasi Keuangan	95%	96,02	101,07
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			100,36
SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Realisasi Investasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
▪ Nilai Realisasi Investasi:			
PMA (ribu USD)	48.102,73	194.425,20	404,19
PMDN (juta Rp.)	3.379.046,35	1.516.964,30	44,89
▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan	22 %	43,15%	196,14
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			215,07
SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	80 %	80,04 %	100,05
▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	3,3	3,23	97,88
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			98,99
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan			138,2

Catf : 1 US \$ = Rp. 13.400,-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berhasil dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 138,2% yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja pada sasaran. Dari 3 (tiga) sasaran strategis diatas semuanya dinyatakan **“berhasil”**.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

Sasaran Strategis Tata kelola organisasi adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Tata kelola organisasi mempunyai lima prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses dan pengungkapan informasi, kinerja organisasi secara akurat;
- Independensi, yaitu kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain;
- Keadilan, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap para *stakeholders*;
- Akuntabilitas, yaitu pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang didasari itikat baik; dan
- Tanggung Jawab, yaitu pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku.

Banyak manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan tata kelola organisasi, diantaranya:

- Meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional organisasi serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai organisasi (*corporate value*); dan
- Meningkatkan kepercayaan investor/donator untuk menanamkan modalnya.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**, terdiri dari dua indikator, yakni:

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
2. Persentase Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan, yaitu:
 - Capaian Realisasi Fisik;
 - Capaian Realisasi Keuangan.

Capaian realisasi indikator sasaran strategis pertama, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100,00
2.	Persentase Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan				
	• Capaian Realisasi Fisik dan	%	100	100	100,00
	• Capaian Realisasi Keuangan	%	95	96,02	101,07
Rata – Rata Capaian Kinerja					100,36 Sangat Baik

Dari tabel 3.2 di atas terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai bahkan melebihi target. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pertama termasuk kategori sangat baik.

1.1. Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini.

- a. Untuk capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja yang dibuat disamping itu juga waktu penyampaian laporan kinerja ke Biro Organisasi. Capaian kinerja atas indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diperoleh nilai "B" untuk Organisasi Perangkat Daerah sehingga capaian kerjanya dikategorikan baik.
- b. Untuk indikator Persentase Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, untuk capaian Realisasi Fisik dari 34 (tiga puluh empat) Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 target yang ditetapkan 100% dapat terealisasi 100% dan capaian realisasi keuangan dari 95% yang menjadi target dapat terealisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori baik dan indikator persentase capaian realisasi fisik dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori baik dan capaian realisasi

keuangan dengan tingkat capaian 101,07% dengan kategori sangat baik dari target 95% yang ditetapkan, dengan rumusan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja Realisasi Keuangan}}{\text{Persentase Target Kinerja Realisasi Keuangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{96,02}{95} \times 100\%$$

$$= 101,07\%$$

1.2. Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu.

Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja sasaran strategis pertama tahun 2017 dengan pencapaian realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya lalu belum dapat dilakukan karena sasaran strategis dan indikator kinerja ini baru digunakan pada tahun 2017. Walaupun baru muncul pada tahun 2017, tetapi indikator ini sudah dilaksanakan juga. Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja sasaran strategis dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4		
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B
2.	Persentase Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan				
	• Capaian Realisasi Fisik dan	100%	100%	100%	100%
	• Capaian Realisasi Keuangan	95%	95%	95%	96,02%

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 3.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

Kegiatan investasi akan mendorong terjadinya transformasi potensi sumber daya ekonomi, yang terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi nilai tambah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa tujuan akhir pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan memberikan peran dan kontribusi dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dengan mengupayakan peningkatan jumlah izin dan realisasi investasi. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat**, terdiri dari dua indikator, yaitu:

1. Penambahan nilai realisasi Investasi:
 - PMA
 - PMDN
2. Persentase izin Penanaman Modal yang direalisasikan.

Capaian realisasi indikator sasaran strategis kedua, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan Nilai Realisasi Investasi: PMA PMDN 	Ribu USD Juta Rupiah	48.102,73 3.379.046,35	194.425,20 1.516.964,30	404,19 44,89
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang direalisasikan 	%	22	43,15	196,14
Rata – Rata Capaian Kinerja				215,07 Sangat Baik	

Cat: 1 US \$ = Rp. 13.400,-

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yang ditetapkan, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 215,07% dengan kategori sangat baik.

2.1. Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini.

- a. Untuk capaian kinerja indikator pertama penambahan realisasi PMA dan PMDN pada sasaran strategis kedua ini, adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja nilai realisasi PMA

$$= \frac{\text{Nilai Realisasi PMA}}{\text{Target Realisasi PMA}} \times 100\%$$

$$= \frac{194.425,20}{48.102,73} \times 100\%$$

$$= 404,19\%$$

Capaian Kinerja nilai realisasi PMDN

$$= \frac{\text{Nilai Realisasi PMDN}}{\text{Target Realisasi PMDN}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.516.964,30}{3.379.046,35} \times 100\%$$

$$= 44,89\%$$

Untuk capaian kinerja indikator kedua persentase Izin Penanaman Modal yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama ini, adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jlh Izin Prinsip PMA + Jlh Izin Prinsip PMDN yang Merealisasikan Kegiatan}}{\text{Jlh Izin Prinsip PMA + Jlh Izin Prinsip PMDN yang Masih Berlaku Tahun 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{57 + 107}{229 + 151} \times 100\%$$

$$= \frac{43,15 \%}{22 \%} \times 100\%$$

$$= 196,14\%$$

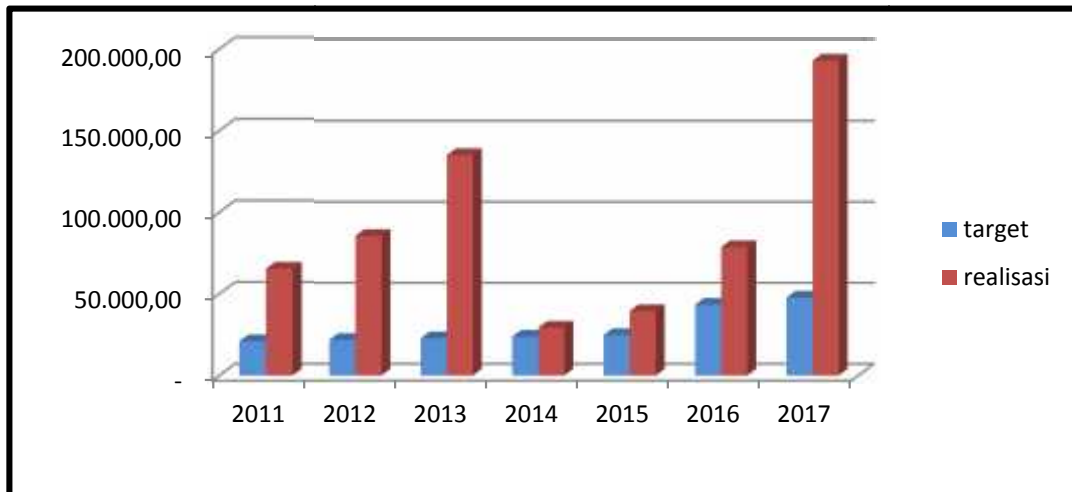
2.2. Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu.

Realisasi investasi pada tahun 2017 sebanyak 226 proyek, yang terdiri dari 137 proyek PMA dengan nilai investasinya sebesar US \$ (ribu) 194.400 persentase pencapaian sasaran sebesar 404,19% dan 129 proyek PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.516.964,30 juta dengan persentase capaian sebesar 44,89%. Realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat besar, yakni sebesar 105,70% atau sebesar Rp. 222.259.907.000,- . Secara total realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 4.121.960.000.000 (empat triliun seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) melampaui target renstra sebesar Rp. 4.023.622.932.000,- (empat triliun dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 102,44% atau sebesar Rp. 98.337.068.000,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah). Realisasi investasi tersebut di atas merupakan nilai dari realisasi investasi langsung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima dari perusahaan PMA dan PMDN diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Belum termasuk perusahaan berbadan hukum yang sudah beroperasi tetapi tidak wajib menyampaikan LKPM. Realisasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat Tahun 2017 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.

Realisasi PMA yang ditargetkan dari tahun 2011 sampai dengan 2017 dapat tercapai sesuai target, bahkan dapat tercapai jauh melebihi target. Perkembangan realisasi PMA tahun 2011 – 2017 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 turun dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 realisasi PMA kembali mengalami kenaikan sebesar 34,45% dengan nilai realisasi sebesar US\$ 39,75 juta. Terjadinya penurunan realisasi PMA pada tahun 2014, disebabkan karena belum terealisasinya beberapa proyek yang telah disetujui yang diperkirakan terkendala beberapa hal, antara lain: (1) ketersediaan energi dan infrastruktur yang belum memadai; dan (2) perusahaan PMA di Sumatera Barat banyak di sektor pertambangan yang terhenti kegiatannya, hal ini disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, peraturan tersebut mengisyaratkan tentang pelarangan ekspor bahan tambang mentah dari negara Indonesia, disebutkan bahwa setiap jenis komoditas tambang mineral logam harus diolah dan dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurniannya. Jadi tidak lagi seperti yang dilakukan selama ini, selesai dikeruk langsung dimuat ke tongkang dan dibawa ke luar negeri,

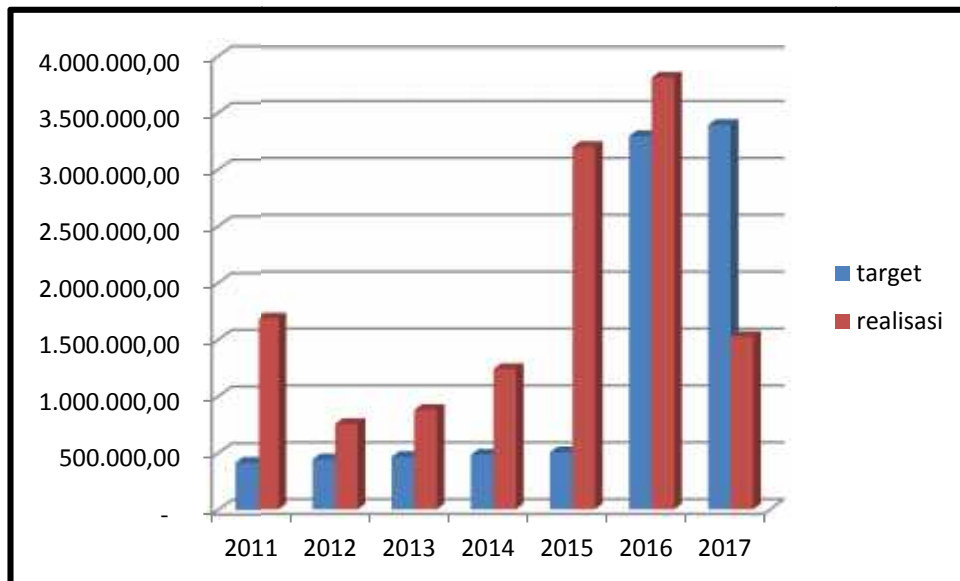
hal ini tentu akan berdampak bagi investor pertambangan. Perkembangan realisasi PMA tahun 2011 – 2017 dapat dilihat pada grafik 3.3 dibawah ini.

Grafik 3.3
Perkembangan Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2017
(dalam Juta US \$)



Sementara untuk realisasi PMDN tahun 2011 – 2017, sempat terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2012 sebesar 158,32% dari tahun 2011. Namun selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 60,03% dari tahun 2016 atau sebesar Rp. 2.278.575,50 juta. Perkembangan realisasi PMDN tahun 2011 – 2017 dapat dilihat pada grafik 3.4 di bawah ini :

Grafik 3.4
Perkembangan Realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2017
(dalam juta Rp.)



Perbandingan realisasi kinerja PMA dan PMDN dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, seperti tampak pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Penambahan Realisasi PMA dan PMDN
Tahun 2011 - 2017

No	TAHUN	PMA (ribu USD)			PMDN (juta rupiah)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2011	21.000	65.456,98	311,70	418.000	1.678.384,30	401,53
2.	2012	22.000	86.194,93	391,80	439.000	749.934,63	170,83
3.	2013	23.000	136.121,43	591,83	461.000	873.761,90	189,54
4.	2014	24.000	29.568,14	123,20	480.000	1.233.021,83	256,88
5.	2015	25.000	39.754,32	159,02	501.000	3.185.075,82	635,74
6.	2016	43.729,75	79.268,10	181,27	3.280.628,09	3.795.575,50	144,72
7.	2017	48.102,73	194.400,00	404,14	3.379.046,35	1.516.964,30	44,89
JUMLAH		206.832,48	630.763,90	304,96	8.958.674,44	13.032.718,28	145,48

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat capaian realisasi PMA yang ditargetkan pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat selama periode 2011 sampai dengan tahun 2017 sudah jauh melampaui target yaitu sebesar 304,96% atau sebesar US \$ 630.763,90 ribu. Begitu juga dengan capaian realisasi PMDN yang ditargetkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2011 sampai dengan tahun 2017 juga jauh melebihi target yaitu sebesar 145,48% atau sebesar Rp. 13.032.718,28 juta.

Perbandingan realisasi kinerja PMA dan PMDN dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra SKPD 2016 – 2021, seperti tampak pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Penambahan Realisasi PMA dan PMDN
(Target pada Renstra 2016 – 2021)
Tahun 2015 - 2017

No	TAHUN	PMA (ribu USD)			PMDN (juta rupiah)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2015	25.000,00	39.754,32	159,02	501.000,00	3.185.075,82	635,74
2.	2016	43.729,75	79.268,10	181,27	3.280.628,09	3.795.575,50	144,72
3.	2017	48.102,73	194.400,00	404,14	3.379.046,35	1.516.964,30	44,89
JUMLAH		116.832,48	313.422,42	268,27	7.160.674,44	8.497.615,62	118,67

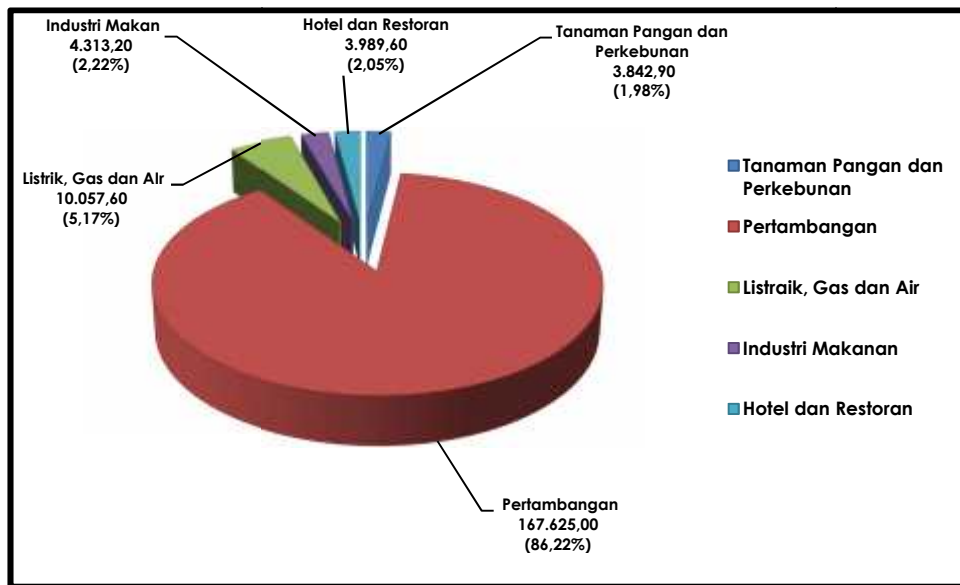
Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat capaian realisasi PMA yang ditargetkan pada Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016 sampai dengan tahun 2017 sudah jauh melampaui target yaitu sebesar 268,27% atau sebesar US \$ 313.42,42 ribu. Namun pada PMDN capaian realisasi yang ditargetkan pada renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016 sampai dengan tahun 2017 juga jauh melebihi target yaitu sebesar 118,67% atau sebesar Rp. 8.497.615,62 juta.

❖ **Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha**

Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) pada tahun 2017 didominasi oleh sektor Pertambangan dengan realisasi sebesar US \$ 165.625,00 ribu (86,224%), sektor Listrik, Gas dan Air dengan realisasi sebesar sebesar US \$ 10.057,60 (5,22%), sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar US \$ 4.313,20 (2,22%), sektor Hotel dan Restoran dengan realisasi sebesar US \$ 3.989,60 (2,05%),

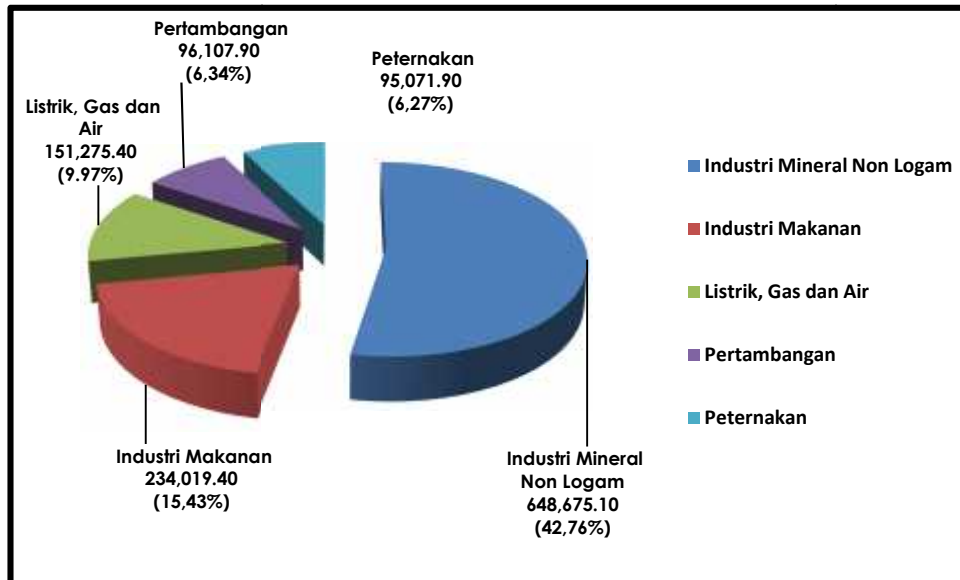
sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan realisasi sebesar US \$ 3.842,90 (1,98%), sektor Perdagangan dan Reparasi dengan realisasi investasi sebesar US \$ 1.932,80 (0,99%). Kontribusi sektor usaha terhadap realisasi PMA ditunjukkan oleh pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017
(dalam US \$ Ribu)



Sedangkan untuk realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha didominasi oleh sektor Industri Mineral Non Logam sebesar 42,76% (Rp. 648.675,10 juta), Industri Makanan sebesar 15,43% (Rp. 234.019,40 juta), Listrik, Gas dan Air sebesar 9,97% (Rp. 151.275,40 juta), Pertambangan sebesar 6,34% (Rp. 96.107,90 juta) dan Peternakan sebesar 6,27% (Rp. 95.071,90 juta). Kontribusi sektor usaha terhadap realisasi PMDN ditunjukkan oleh grafik berikut :

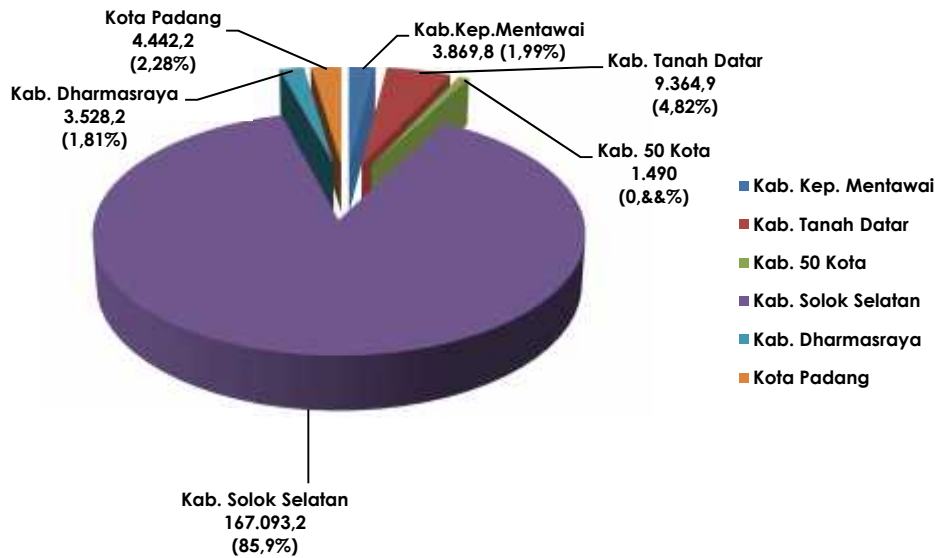
Grafik 3.6
Kontribusi Sektor terhadap Realisasi PMDN
di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017
(dalam juta Rp.)



❖ **Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi**

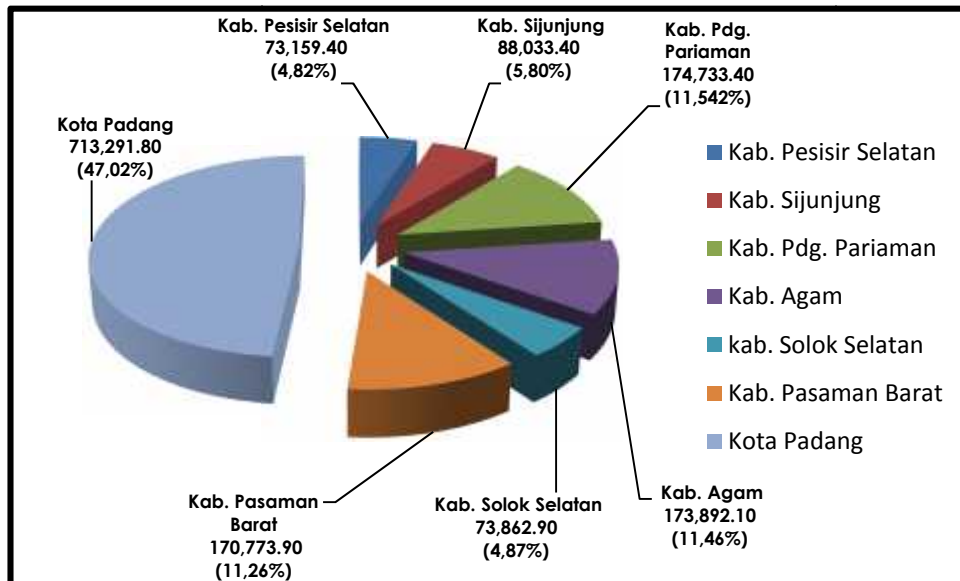
Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMA di Sumatera Barat 5 besar kabupaten/kota berada di Kab. Solok Selatan dengan kontribusi terhadap realisasi investasi PMA sebesar 85,94% (US\$ 167.093,20 ribu). Kemudian secara berurutan Kab. Tanah Datar terhadap realisasi investasi PMA sebesar 4,82% (US\$ 9.364,90 ribu), Kota Padang realisasi investasi PMA sebesar 2,28% (US\$ 4.442,20 ribu), Kab. Kep. Mentawai realisasi investasi PMA sebesar 1,99% (US\$ 3.869,80 ribu), Kab. Dharmasraya realisasi investasi PMA sebesar 1,81% (US\$ 3.528,20 ribu), Kab. 50 Kota realisasi investasi sebesar 0,77% (US \$ 1.490,00), sebagaimana grafik di bawah:

Grafik 3.7
Penyebaran Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017
(dalam Ribu US \$)



Sementara itu realisasi investasi PMDN terbesar berada di Kota Padang sebesar 47,02% (Rp. 713.291,80 Juta). Kemudian disusul secara berurutan oleh Kab. Padang Pariaman sebesar 11,52% (Rp. 174.733,40 juta), Kab. Agam sebesar 11,46% (Rp. 173.892,10 juta), Kab. Pasaman Barat sebesar 11,26% (Rp. 170.773,90 juta), Kab. Sijunjung sebesar 5,80% (Rp. 88.033,40 juta), Kab. Solok Selatan sebesar 4,87% (Rp. 73.862,90 Juta), Kab. Pesisir Selatan sebesar 4,82% (Rp. 73.159,40 Juta) Realisasi investasi PMDN di Sumatera Barat berdasarkan lokasi, seperti tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3.8
Penyebaran Realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017
(dalam Juta Rp.)

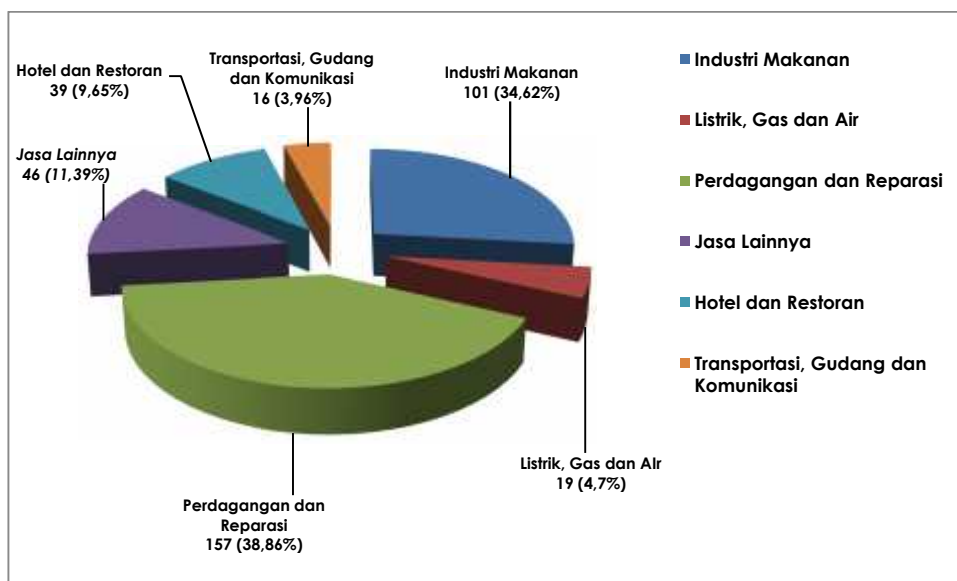


❖ **Penyerapan Tenaga Kerja**

Tidak salah jika investasi disebut sebagai salah satu motor utama laju roda perekonomian. Selain meningkatkan kapasitas produksi domestik, investasi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2017 penyerapan tenaga kerja Indonesia dari aktivitas investasi mencapai 3.186 orang. Penyerapan lebih banyak dilakukan oleh PMDN yang pada tahun 2017 menyerap 2.782 orang tenaga kerja, sedangkan PMA hanya menyerap 404 orang tenaga kerja. Beberapa insentif *fiscal* seperti *tax holiday* maupun *tax allowance* juga memberikan syarat penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Tapi yang lebih penting adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja.

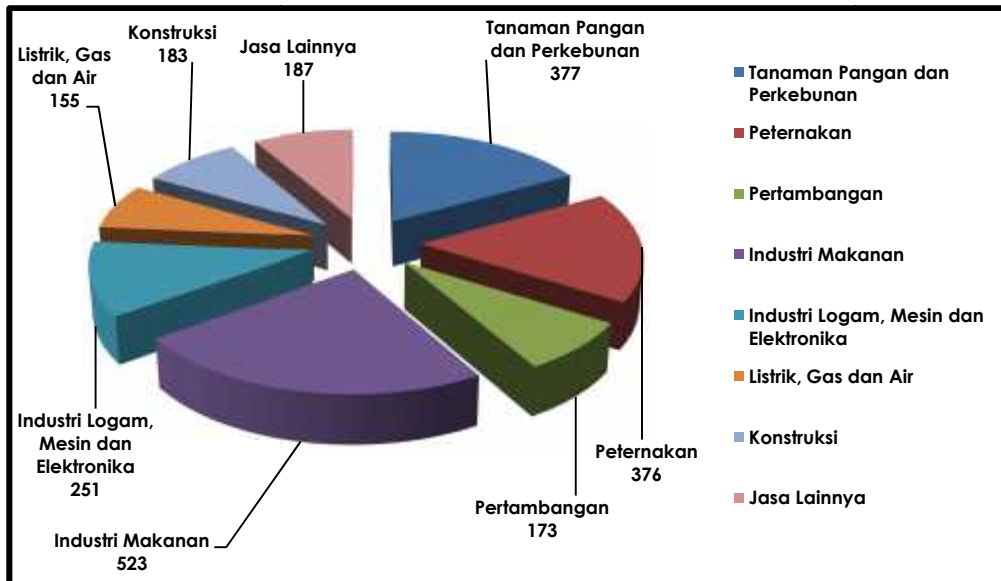
Penyerapan tenaga kerja pada PMA (5 besar) di sektor Perdagangan dan Reparasi sebanyak 157 orang, yang menyerap 38,86%, setelah itu pada sektor Industri Makan sebanyak 101 orang, yang menyerap 34,62%, sektor Jasa Lainnya sebanyak 46 orang, yang menyerap sebesar 11,39%, sektor Hotel dan Restoran sebanyak 39 orang, yang menyerap 9,65% dan sektor Listrik, Gas dan Air sebanyak 19 orang, yang menyerap 4,7% dari total tenaga kerja yang diserap oleh PMA. Penyerapan tenaga kerja atas realisasi investasi PMA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada PMA
di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sektor
tahun 2017



Pada PMDN tenaga kerja Indonesia banyak terserap di sektor Industri Makanan menyerap sebesar 18.80% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 523 orang, sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan menyerap sebesar 13.55% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 377 orang, sektor Peternakan yang menyerap 13.52% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 376 orang, sektor Industri Logam, Mesin dan Elektronika menyerap sebesar 9.02% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 251 orang dan sektor Jasa Lainnya menyerap sebesar 6.72% dengan jumlah tenaga kerja 187 orang, sektor Konstruksi menyerap sebesar 6,57% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 183 orang, sektor pertambangan sebesar 6,22% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 173 orang, sektor Listrik, Gas dan Air menyerap sebesar 5,57% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 155 orang. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor atas realisasi investasi PMDN, dapat dilihat pada grafik berikut:

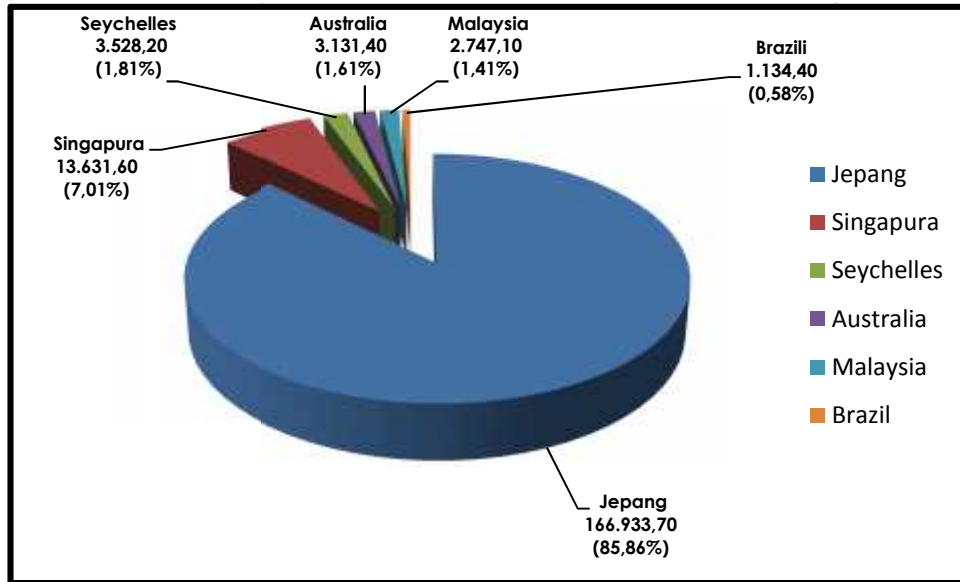
Grafik 3.10
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada PMDN
di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sektor
tahun 2017



Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara

Realisasi investasi PMA tahun 2017 berdasarkan **asal negara** (5 besar) adalah Negara Jepang dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 166.933,70 ribu (85,86%), Negara Singapura dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 13.631,60 ribu (7,01%), Negara Seychelles dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 3.528,20 ribu (1,81%), Negara Australia dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 3.131,40 ribu (1,61%) dan Negara Malaysia dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 2.747,10 ribu (1,41%), Negara Brazilia dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 1.134,40 ribu (0,58%), sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.11 berikut:

Grafik 3.11
Realisasi PMA Berdasarkan Asal Negara
di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017
(dalam US \$ ribu)



Realisasi indikator kedua persentase izin penanaman modal yang direalisasikan pada tahun 2017 sebesar 43,15% mengalami kenaikan sebesar 15,71% dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 27,44%, sehingga capaian kinerja indikator kedua persentase izin penanaman modal yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua meningkatnya realisasi investasi tahun 2017 sebesar 196,14% mengalami kenaikan sebesar 58,94% dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 137,20%.

Perbandingan target, realisasi dan capaian realisasi indikator persentase izin penanaman modal yang direalisasikan pada sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Persentase Izin Penanaman Modal Yang Direalisasikan
Tahun 2016 – 2017

No	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	2016	20 %	27,44 %	137,20 %
2	2017	22 %	43,15 %	196,14 %

Pencapaian sasaran kedua ini tidak terlepas dari komitmen Gubernur, DPRD, investor, para Bupati/Walikota dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat akan terus bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik bagi Sumatera Barat. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang kedua ini, telah dilaksanakan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Daya saing penanaman modal sampai saat ini masih rendah dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan daya saing penanaman modal. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum.

Dengan telah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu ISO SNI 9001: 2008 oleh Lembaga Sertifikasi *PT. ASRicert Internasional Indonesia* yang diterima pada tanggal 30 November 2015 dan terakhir di *update* di akhir tahun 2017 pada tanggal 25 September 2017 yang akan berakhir 25 September 2018 dan diharapkan pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat sudah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu ISO SNI 9001: 2015. Diharapkan kinerja terhadap pelayanan guna mencapai pelayanan prima yaitu pelayanan cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Realisasi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 yang dijabarkan ke dalam Belanja Langsung Urusan dengan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, sehingga melewati target realisasi investasi yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelesaian Permasalahan Investasi**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp. 93.900.000,-.

Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 86.577.900,- (92.20%), dan capaian fisiknya sebesar 84%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target. Rendahnya penyerapan anggaran di bawah 95% adalah sisa anggaran pada Belanja Bahan Bakar/Gas (yang digunakan untuk kegiatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi yaitu implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Instansi Teknis terkait dalam Penanaman modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota merupakan lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing yang diharapkan dapat membantu para penanam modal agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
- Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- Keluaran atau output dari kegiatan ini:
 1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 4 Perusahaan PMA/PMDN.
 2. Dari 4 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya yang dapat terselesaikan tuntas permasalahannya yakni PT. Bintang Paradiso Resort, PT. Energi Baru Terbarukan, PT. Energi Taratak Tampatih dan CV. Putra Idola,

2. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 386.898.964,- (92,12%). Untuk fisik tercapai juga sebesar 100%.

- ❖ Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan investasi daerah dalam lingkup Provinsi dan nasional untuk

bertukar informasi serta mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.

- ❖ Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (sesuai target) sebanyak 3 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal.

- 3. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 370.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 355.341.000,- atau sebesar 96.04% dan realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN untuk penerbitan izin usaha dilakukan terhadap perusahaan yang sudah berproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana dan untuk proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan dilakukan bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali dan tidak lagi berproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan BKPM & PPT Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah:
 1. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 12 perusahaan (tercapai sesuai target), yaitu:
 - 5 perusahaan sudah produksi
 - 6 perusahaan masih dalam masa konstruksi
 - 1 perusahaan tidak ada aktifitas dilapangan (tidak merealisasikan investasinya) atau macet
 2. Pembuatan BAP Penerbitan dan Pencabutan Izin Prinsip/SP terhadap 10 perusahaan (sesuai target 10 perusahaan), yaitu:
 - 3 Perusahaan untuk izin usaha tetap
 - 7 Perusahaan BAP pencabutan
- Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:
 - Adanya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 12 perusahaan (dapat mencapai target 12 perusahaan).
 - Adanya kemudahan bagi investor dalam pengurusan Izin Usaha Tetap (IUT) dan terlaksananya pencabutan Surat Persetujuan (SP) bagi perusahaan yang macet sebanyak 10 perusahaan dapat tercapai sesuai target.

4. Gelar Potensi dan Temu Usaha dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 77.054.435,- (92.25%), untuk realisasi fisik tercapai 100%, sesuai dengan target.

- ❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:
 - a. Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka promosi sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
 - b. Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggara dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Batam, yang menghasilkan ketertarikan beberapa investor, seperti:

1. Andy Setiawan (Overseas Business MD) dari Surabaya tertarik untuk berinvestasi di sektor Perkembunan Nilam di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Ke Zong Xian berasal dari PT. Damai Indo Pertama Sukses dan PT. Sehat Bulan Investama yang tertarik berinvestasi di sektor, antara lain :
 - Karet di Kab. Sijunjung
 - Damar di Kab. Sijunjung
3. Ir. Irsafwin berasal dari PT. Multi Energi Sarana Batam yang tertarik untuk berinvestasi di bidang:
 - Pengolahan Sampah di Kota Swahlunto
 - Air Minum Sehat di Kota Sawahlunto
4. A.Jabbar Hanief berasal dari Singapura VBN International Enterprise yang tertarik untuk berinvestasi di bidang :
 - Minyak Nilam di Kab. Pasaman Barat
 - Pariwisata di Kab. Pdg. Pariaman
5. Imam Mocktar dan Amanto berasal dari PT. Semen Bosowa di Kota Batam yang tertarik untuk berinvestasi di sektor Industri Semen di Sijunjung.
 - ❖ Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 50 orang.

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 5 calon investor (sesuai target).

5. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 295.577.450,- (98,53%), serta realisasi fisik tercapai 100%.

- Maksud dari kegiatan ini adalah agar bahan informasi tentang potensi dan peluang investasi Sumatera Barat tersedia lengkap dengan data terkini dan dapat digunakan untuk keperluan promosi.
- Sementara itu tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang potensi dan peluang investasi daerah agar pengguna terutama calon investor tahu apa yang menjadi peluang untuk berinvestasi di Sumatera Barat dan menyediakan bahan penunjang pelaksanaan promosi investasi.

Pada tahun 2017, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat membuat atau melakukan pengadaan 5 bahan materi promosi yaitu Peta Investasi, Pembuatan Tas Promosi, Pembuatan Map Investasi, Pembuatan Souvenir Eksklusif, Pembelian Flashdisk. Adapun pelaksana dari masing-masing pembuatan/pengadaan materi promosi tersebut adalah PT. CELYFA dan PD. Perdana Abadi.

❖ Keluaran pada kegiatan ini dapat tercapai sesuai target, dengan rincian sebagai berikut:

- Peta investasi sebanyak 500 buah
- Tas promosi sebanyak 100 buah
- Map investasi sebanyak 300 buah
- Souvenir Eksklusif sebanyak 80 buah

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi sebanyak 4 (empat) macam materi promosi investasi (sesuai target) serta bahan untuk display promosi investasi.

6. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.044.900.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.023.227.019,- (97,55%), serta realisasi fisik tercapai 100%.

- Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi peluang investasi prioritas Sumatera Barat terutama untuk kelayakan perencanaan kawasan ekonomi khusus Mandeh yang difokuskan pada pariwisata dan prospek usaha prioritas dibidang energi baru terbarukan (pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah kelapa sawit di Kab. Dharmasraya.
- Sementara itu tujuan kegiatan ini adalah menyusun profil peluang investasi prioritas Sumatera Barat yang akan ditawarkan ke pada investor, identifikasi kondisiobjektif potensi investasi secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor serta mengetahui kelayakan KEK Pariwisata Mandeh dan Investasi Pembangunan Proyek PLTG dari Limbah Cair Kelapa Sawit.

7. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. 44.161.050,- (88.32%), serta realisasi fisik tercapai 100%. Sedangkan capaian kinerja sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu dari 6 kabupaten/kota yang menjadi target untuk dilakukan koordinasi dan target calon investor yang difasilitasi tercapai sebanyak 6 calon investor.

❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengkoordinasikan rencana promosi dan hasil promosi Sumatera Barat secara terintegrasi dengan pemerintah pusat, dinas instansi terkait dan kab/kota.
- Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.

- Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.
 - ❖ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan kabupaten/kota sebanyak 6 kabupaten/kota sesuai target (target 6 kabupaten/kota).
 - Jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 6 calon Investor sesuai target (target 6 calon investor), yaitu:
 1. Investor dari Putera Sampoerna foundation yang melakukan kunjungan ke Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan Bapak Gubernur dan SKPD terkait pada tanggal 7 Januari 2017.
 2. Investor asal Belarusia dari perusahaan Belzarubezhstroy yang melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat mengenai rencana investasi sektor energi, yaitu pembangunan PLTM pada tanggal 9 Mei 2017.
 3. Kunjungan Mr. Frid Razalee, CEO Baracca Ltd dan Mr. Simon B Schmidt Managing Director Tacicus Consultans yang menemui Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat mengenai investasi Sumatera Barat yang berminat disektor pariwisata dan energi pada tanggal 16 Mei 2017.
 4. Kunjungan kedua calon investor dari perusahaan Belzarubezhstroy pada tanggal 17-19 Mei 2017 sebagai tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya tanggal 9 Mei 2017.
 5. Kunjungan ketiga calon investor dari perusahaan Belzarubezhstroy pada tanggal 12 Juni 2017 yang melakukan kunjungan lapangan ke kepulauan Mentawai dan audiensi dengan Bupati Kepulauan Mentawai.
 6. Calon Investor asal Norwegia yang bermaksud kerjasama dalam pembangunan centre of excellence of carbon capture utilization an storage.
- Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi promosi & kerjasama dengan kabupaten/kota sebanyak 6 kabupaten/kota dan meningkatnya minat calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat dengan cara menghubungi pihak DPM & PTSP menanyakan tentang peluang investasi yang mereka minati melalui media elektronik.

- 8. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 80.900.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 78.128.000,- (96,57%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

- ❖ Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan dan analisis data terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal sehingga tersedia data dan informasi tentang penanaman modal provinsi Sumatera Barat yang up to date dan informatif bagi pengguna buku data perkembangan penanaman modal Sumatera Barat tahun 2017 sebagai dasar perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal.
- ❖ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah buku Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Tahun 2017 sebanyak 100 (seratus) buku, dapat dicapai sesuai target. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat dimanfaatkannya data perkembangan realisasi investasi fasilitas dan non fasilitas di Sumatera Barat bagi pengambil kebijakan dan dunia usaha sebanyak 19 kab/kota.

9. Penyelenggaraan Promosi Investasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.725.077.834,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.613.708.489,- (93,54%), dan untuk fisik realisasinya juga 100%.

- ❖ Maksud dan tujuan diadakan Promosi Investasi adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha (investor) sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi, menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, serta membangun citra positif yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan.

Uraian beberapa kegiatan terkait dengan promosi investasi selama tahun 2017, adalah sebagai berikut:

A. Dalam Negeri:

1. Kegiatan Regional Investment Forum 2017

Regional Investment Forum dilaksanakan di Bali dari tanggal 22 s/d 25 Februari 2017.

Promoting Investment in Tourism Industry and Supporting Infrastructure atau Promosi Investasi di Bidang Industri Pariwisata" adalah tema utama pada RIF 2017. RIF 2017 terdiri dari beberapa agenda seperti seminar, diskusi panel, *one on one meeting*, *debottlenecking meeting*, peninjauan lapangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala BKPM RI.

Kegiatan ini dihadiri Pemerintah pusat dan daerah, kalangan swasta dan sejumlah calon investor dari beberapa negara serta DPM dan PTSP Provinsi dan Kab/Kota dari beberapa wilayah Indonesia. Pada sesi forum investasi, RIF 2017 menampilkan pemateri dari kalangan *top executive* baik dari pemerintahan maupun dunia usaha seperti antara lain Kepala BKPM RI, Menteri Pariwisata, Dubes RI untuk Cina, Dubes RI untuk UEA, CEO Sinarmas Land Group, President Direktur Bank BNI, and *President Director of Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*.

Kegiatan *Regional Investment Forum* dihadiri oleh DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pasaman, Pesisir Selatan dan Kota Solok.

Pada akhir forum, dilanjutkan dengan *one on one meeting*, BKPM Pusat memfasilitasi pertemuan DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bertemu langsung dengan para calon investor yang berminat dari beberapa negara, diantaranya Singapura, Cina, Taiwan, Jepang dan sebagainya.

Kegiatan ini dihadiri Pemerintah pusat dan daerah, kalangan swasta dan sejumlah calon investor dari beberapa Negara serta DPM dan PTSP Provinsi dan Kab/Kota dari beberapa wilayah Indonesia. Pada sesi forum investasi, RIF 2017 menampilkan pemateri dari kalangan *top executive* baik dari pemerintahan maupun dunia usaha seperti antara lain Kepala BKPM RI, Menteri Pariwisata, Dubes RI untuk Cina, Dubes RI untuk UEA, CEO Sinarmas Land Group, President Direktur Bank BNI, and *President Director of Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*.

Kegiatan *Regional Investment Forum* dihadiri oleh DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Kota Solok.

Pada akhir forum, dilanjutkan dengan *one on one meeting*, BKPM Pusat memfasilitasi pertemuan DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bertemu langsung dengan para calon investor yang berminat dari beberapa negara, diantaranya Singapura, Cina, Taiwan, Jepang dan sebagainya.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

Pada sesi *one on one meeting* dilaksanakan, ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

1. Mr. Masashige Urata yang berasal dari Hokkaido, Jepang, daerah yang juga merupakan tujuan wisata yang populer di Jepang tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Yang bersangkutan secara spesifik mencari daerah yang sejuk. Wilayah yang ditawarkan adalah Kabupaten Solok, khususnya Danau Diatas dan Danau di Bawah yang beriklim sejuk serta telah mempunyai infrastruktur yang memadai.
2. Mr. Jonghyuk merupakan perwakilan dari Perusahaan Sangyong yang merupakan salah satu Perusahaan Automotif terbesar di Korea Selatan yang juga telah merintis usaha di bidang pariwisata khususnya Industri Perhotelan. Provinsi Sumbar menawarkan Kota-Kota atau daerah di Sumatera Barat yang belum memiliki hotel bintang 4.
3. Serupa dengan Sangyong, LG yang di Indonesia telah dikenal sebagai Produsen barang-barang Elektronik juga telah mulai berinvestasi di Industri Pariwisata. Saat ini mereka tengah mencari daerah-daerah yang potensial untuk dibangun hotel atau infrastruktur pendukung lainnya.
4. Mr. Misyah Bahwal adalah pengusaha Indonesia keturunan India yang mempunyai akses ke banyak investor besar di India yang tertarik untuk berinvestasi di bidang pariwisata. Sumatera Barat adalah satu daerah yang diminati. Mr. Misyah akan menghubungi kembali DPM PTSP Sumbar.
5. PT. AGS adalah salah satu perusahaan konglomerat di Turki yang bisnis utamanya di bidang energi dan tekstil yang juga tertarik untuk berekspansi di bidang pariwisata. Mereka tertarik untuk membangun *Cable Car* di Agam dan Infrastruktur penunjang lainnya,
6. Mrs. Amanda Zsebik mewakili perusahaan AL IIKAI yang bergerak di bidang pelayaran khususnya kapal pesiar. Ybs telah lama mendengar tentang potensi Kab. Mentawai dan berminat untuk berinvestasi disana.

2. Kegiatan Batam Tourism Expo 2017

Batam Tourism Expo 2017 dilaksanakan di Batam dari tanggal 11 s/d 14 Mei 2017.

Batam Tourism Expo dan Forum 2017 merupakan Pameran dan Forum Bisnis Industri Pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi objek wisata unggulan di Indonesia dan meningkatkan kunjungan turis dan menarik investor di sektor industri pariwisata. Kegiatan ini digelar oleh PT. Batam Promo Indonesia dan dukungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam yang akan diadakan pada tanggal 11 s/ 14 Mei 2017 di Expo Hall, Mega Mall Batam dan Harris Hotel Batam Centre.

Pada sesi *one on one meeting* dilaksanakan, ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

1. Dato Andrew Koh, Presiden Malaysia-China Economy Development Foundation yang tertarik pada potensi pembangunan hotel di Ulakan Tapakis
2. Ivan Theo, Honorary Chairman, GM-Ponderosa, Malaysia Association of Hotel Johor Chapter yang tertarik pada sektor pariwisata.

3. Kegiatan Internasional Powermax 2017

Pameran Internasional Powermax 2017 dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 25 s/d 28 Juli 2017.

Pelaksanaan Pameran POWERMAX 2017, surat PT. MyExpo Kreasi Indonesia Nomor 6595/MKI/PD/VII/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat Penawaran Stand dan Undangan dalam Kegiatan Power Plant & Manufacturing, Automation Expo 2017 (POWERMAX 2017), serta surat Direktur Fasilitas Promosi Daerah Nomor 77/B.3/A.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 perihal Partisipasi Kegiatan POWERMAX 2017.

Pada kegiatan pameran yang dilaksanakan, calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Ryad Chairil, PT. Solusi Limbah Energi yang tertarik pada potensi energi Kabupaten Pasaman
- ✓ Jhonson Jaya, PT. Jaya Samudra Karunia Gas tertarik sektor energy Kabupaten Pasaman.

4. Kegiatan Trade Expo Indonesia ke -32 Tahun 2017

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Trade Expo Indonesia ke-32 Tahun 2017 dilaksanakan di Banten dari tanggal 11 s/d 15 Oktober 2017.

Kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 adalah pameran dagang skala internasional terbesar di Indonesia diadakan oleh Kementerian Perdagangan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 11 s.d. 15 Oktober 2017 bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan ini bertajuk "*Global Partner for Sustainable Resources*" berkaitan dengan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia. Fokus utama TEI adalah transaksi *business-to-business* yang bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia di kancah perdagangan internasional.

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya calon investor yang menunjukkan ketertarikan pada sektor renewable enegy, yakni SUMITO, PT Prima Tata Daya.

5. Kegiatan Sumatera Barat Expo 2017

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Sumatera Barat Expo 2017 dilaksanakan di Batam dari tanggal 9 s/d 12 November 2017.

Kegiatan Sumatera Barat Expo (Sumbar Expo) merupakan agenda rutin tahunan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam memperkenalkan daerah Sumbar kepada pihak luar sekaligus menjembatani para pengusaha, akademisi, perantau dari Tanah Minang, hingga calon investor. Pada tahun 2017 ini kegiatan Sumbar Expo diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 s.d. 12 November 2017 bertempat di Lapangan Engku Putri Kota Batam. Adapun pemilihan Kota Batam sebagai tuan rumah Sumbar Expo karena memiliki lokasi strategis berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia. Selain itu di kota ini terdapat banyak perantau asal Minang dan memiliki hubungan sosial budaya yang merupakan saudara serumpun Melayu.

Kegiatan Sumbar Expo 2017 diikuti oleh 19 Kabupaten/Kota, 17 organisasi perangkat daerah, 1 kabupaten luar Sumbar yaitu Ngawi

dari Jawa Timur, 9 BUMN, dan 65 pengusaha. Selain mempertemukan berbagai kalangan, Sumbar Expo 2017 juga diisi dengan pengukuhan Ikatan Keluarga Sumatra Barat (IKSB) periode 2017-2022. Masyarakat Minangkabau atau warga Sumbar di tanah Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu komunitas yang cukup dominan. 27 persen dari 1,2 juta keseluruhan jumlah penduduk di Kota Batam merupakan keturunan Minang. Perantau Minang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan daerah Kepri, termasuk birokrat, politikus, tokoh agama, dan pengusaha. Dengan adanya kegiatan Sumbar Expo ini dapat menjadi ajang promosi semua potensi, sekaligus mengajak investasi dan wisatawan datang ke Sumbar.

Hasil:

Pada kegiatan pameran yang dilaksanakan, calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Hendrik Tan Sandy yang tertarik pada sektor perkebunan Karet dan Damar.

6. Kegiatan Lombok Produk Unggulan, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi (PPI) 2017

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Lombok PPI 2017 dilaksanakan di Lombok dari tanggal 30 November s/d 3 Desember 2017.

Kegiatan Lombok PPI 2017 yang rencananya akan diikuti oleh DPM dan PTSP mulai dari tanggal 30 Desember 2017, mengingat kondisi bencana alam (kondisi Gunung Agung pada status siaga I), sehingga tim pelaksana yang akan melanjutkan perjalanan ke Lombok harus ditunda sementara menunggu informasi selanjutnya dari maskapai penerbangan. Tanggal 1 Desember 2017, rombongan bertolak ke Lombok untuk melakukan persiapan di stand.

Hasil:

Pada kegiatan pameran yang dilaksanakan, calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Arman RD tertarik pada sektor industry hilir khususnya kelapa sawit.

B. Kegiatan Luar Negeri:

1. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Norwegia

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Oslo, Norwegia dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 18 Januari 2017.

Hasil:

Pada sesi *one on one meeting* dilaksanakan, ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Kelanjutan kerjasama dengan Pemerintahan Norwegia, Kementerian Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia tentang implementasi dari rencana yang sudah dibuat pada saat *readiness*. Dari 2 juta Ha lebih, hutan di Sumbar, 500 ribu Ha sudah dialokasikan untuk dikelola oleh masyarakat.
- ✓ SN Power (BUMN) Norwegia tertarik dan akan menindaklanjutinya untuk rencana investasi di sektor Hydropower di Sumatera Barat *Hidro Power*. Prospek yang ditawarkan untuk dibangun adalah 160MW (Mega Watt) di Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat.
- ✓ Pharmaq, Zoetis Group, yang merupakan perusahaan vaksin ikan terbesar di Norwegia yang berkantor di Oslo. Pada pertemuan ini juga dibahas tentang vaksin terhadap virus dan bakteri pada ikan. Permasalahan kematian ikan emas sebelum berkembang Di Sumatera Barat ditengarai karena ada virus. Begitu juga beberapa ikan Nila terjangkit virus yang perlu dicari vaksinnya. Diharapkan didapatkan solusi yang optimal untuk mengatasi kematian ikan dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kejadian ini. Pihak Pharmaq merespon tawaran dari Sumatera Barat ini dengan sangat positif dan menginginkan untuk ditingkatkan menjadi sebuah kerjasama yang konkrit.
- ✓ Kepada Mr. Oscar Fr. Graff, Manager & CTO Dept of Clean Carbon Aker Solutions, kami menyampaikan peluang bagi Pihak Aker Solution untuk mengubah limbah industri dan karbon menjadi bernilai ekonomi bagi Sumatera Barat. Pihak Aker Solution merespon dengan membantu terobosan teknologi dan investasi di Sumatera Barat. Kesepakatan yang dibicarakan antara lain mengenai *Carbon Capture & Utilization Plant*, Studi kelayakan teknologi dan ekonominya, kandungan lokal dan pemberdayaan SDM lokal, serta transfer ilmu dari Aker Solution kepada sumber daya manusia lokal.

2. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke London

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

London dilaksanakan dari tanggal 25 s/d 29 Maret 2017.

Hasil:

Mr. Frid Razalee CEO dari Barraca Ltd menyampaikan ketertarikannya kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat atas potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat, khususnya di bidang pembangkit listrik tenaga micro hidro dan pariwisata dan mengundang Wakil Gubernur untuk mengadakan pertemuan dengan relasi yang bersangkutan, yaitu Mr. Waheed Qaiser Managing Director Capital Synergies Ltd dan Mr. Philip Vasey Head of Research Maxim Corporate Finance Ltd, para profesional di bidang investasi dan fund manager yang mempunyai akses ke banyak investor potensial.

3. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Belanda, Belgia dan Polandia

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Den Haag, Brussel, Polandia dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 31 Mei 2017.

Hasil :

- Tomo Group berminat untuk investasi dan menawarkan berbagai peluang serta strategi pengembangan *renewable energy* seperti di bidang PLTM/PLTMH, PLTA, juga pengolahan limbah di Sumbar.
- Sementara Ryszard Ciurus dari URSUS tertarik untuk kerjasama di bidang modernisasi Alsintan di Sumbar. Hal ini dimungkinkan, karena 60 persen penduduk Sumbar bergerak dibidang pertanian.
- Perusahaan Molenbergnatie yang merupakan perusahaan terbesar dan tertua di Belgia yang khusus bergerak di bidang perdagangan, penyimpanan dan logistik kopi. Perusahaan ini sudah mempunyai terminal untuk ekspor di Indonesia yaitu di Lampung dan Kalimantan Timur. Molenbergnatie melalui Country Managernya Charles Contamine menjelaskan, bahwa perusahaan yg telah berdiri sejak tahun 1867 (150 tahun lalu) itu, membeli kopi dari pedagang seluruh dunia. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Kabupaten Agam, Sijunjung dan Solok Selatan sangat tertarik untuk mengembangkan lebih lagi perkebunan dan produksi kopi di Sumbar yang kemudian bisa dijual ke Molenbergnatie. Pemerintah Daerah melalui stakeholder terkait,

akan mendorong dan memfasilitasi petani kopi di Sumbar, agar bisa masuk dan bekerjasama dengan Molenbergnatie yang juga pemasok kopi Nestle, Starbuck dan lain-lain. Peluang petani kopi Sumbar terbuka lebar, karena kopi Indonesia, terutama kopi dari Sumatera Barat, merupakan kopi terbaik di dunia atau berada dalam kualitas tinggi. Kualitas kopi Sumatera, telah diakui sendiri oleh Molenbergnatie, yang saat ini masih membutuhkan kopi dari Indonesia.

- SIPEF, perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Palm Oil, Pisang, Karet, Nanas dan lain-lain. Menurut Chief Financial Officer SIPEF Mr. Johan Nelis, Perusahaan ini memiliki lebih dari 15 ribu pekerja dan 13 ribu orang berada di Sumatera, kecuali Sumatera Barat SIPEF belum ada investasinya dan telah berdiri sejak tahun 1919. SIPEF akan mensurvey untuk berinvestasi di Sumbar dengan cara kerjasama dengan masyarakat yang punya lahan. Selain itu, SIPEF bisa menyerap produksi sawit, karet, dan pisang dari petani perkebunan rakyat dengan harga yang baik.

4. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Ottawa, Kanada

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Ottawa dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 29 Agustus 2017.

Berdasarkan hasil dari komunikasi dengan KBRI Ottawa, untuk Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat dalam sesi *business forum, one on one meeting* dan kerjasama ekonomi regional dan internasional, Sumatera Barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor *tourism, renewable (Hidro Power dan Geothermal)* dan *fishery* yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama. Selain berpartisipasi pada *Indovest 2017*, Pemerintah Sumatera Barat akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan potensi dan peluang investasi unggulan daerah dalam rangka menarik investasi dari Kanada ke Sumatera Barat dan menjajaki kemungkinan peluang kerjasama antar negara.

Hasil :

Bill Young, International Genetik yang tertarik terhadap peternakan sapi unggul yang berada di Padang Mangateh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah membutuhkan dukungan dari investor untuk pembenahan infrastruktur dan peningkatan penghasilan. Tindaklanjut dari pertemuan ini, pihak investor berencana akan menjajaki

kemungkinan investasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Cologne, Jerman

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Cologne, Jerman dilaksanakan dari tanggal 5 s/d 12 Oktober 2017.

Selain mengikuti kegiatan pameran Anuga 2017, Pemerintah Provinsi Sumbar juga bermaksud melakukan kegiatan misi investasi dalam rangka promosi daerah di bidang investasi kepada para pelaku usaha dan investor potensial Jerman. Dalam hal ini Sumatera Barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor renewable energy, micro hydro powerplant, tourism, fishery, mining, industry dan sites for center industry yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama..

Hasil :

- ✓ MAN Diesel dan Turbo di Oberhausen, Jerman tertarik bekerjasama di bidang investasi di sektor energi terbarukan.
- ✓ Di Kantor Bavarian Ministry of Economic Affairs and Media, ada tiga sesi pertemuan rombongan Gubernur, selain menyangkut geothermal, juga menawarkan investasi di bidang pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan kepariwisataan. Hans-Jurgen Radmacher didampingi Andreas Wurth, dari pihak negara Bagian Bavaria menyanggupi untuk membuka peluang buat usahawan setempat berinvestasi di Sumatera Barat dan koordinasi dengan Kedubes RI akan terus dilakukannya.

6. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Hawaii

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Manoa, Hawaii, Los Angeles dilaksanakan dari tanggal 18 s/d 18 November 2017.

Merujuk surat dari Direktur Pusat Studi Negara-Negara Asia Tenggara dari *University of Hawaii* tanggal 10 Juli 2017 perihal undangan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat hadir dalam kuliah umum sekaligus menampilkan budaya dan kesenian tradisional pada acara *International Education Weeks* yang juga akan dihadiri oleh berbagai negara pada tanggal 13 s/d 17 November 2017. Dalam hal ini, Sumatera Barat berkesempatan untuk dapat mempromosikan budaya dan

kesenian tradisional, promosi wisata, untuk itu DPM dan PTSP melakukan persiapan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan kegiatan dan teknis perjalanan dinas keluar negeri.
- Melakukan koordinasi dengan KBRI dan Kemenlu terkait dan BKPM RI (IIPC) mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan *International Education Week* di Manoa, Universitas Hawaii pada tanggal 13–17 November 2017.

Selain mengikuti Kegiatan *International Education Week*, Pemerintah Provinsi Sumbar juga bermaksud melakukan kegiatan misi investasi dalam rangka promosi daerah di bidang investasi kepada para pelaku usaha dan investor potensial Hawaii dan Los Angeles dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional khususnya Sumatera Barat. Dalam hal ini, Sumatera barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor *renewable energy, micro hydro powerplant, tourism, dan agriculture* yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di New York yang dilaksanakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles.

Hasil :

- ✓ Investor Seafood, H & N Group, yaitu Mr. Hua Ngo, di Los Angeles California. Dalam kesempatan ini dijangki untuk pengembangan tambak ikan patin di pantai Sumatera Barat. Dari pihak investor akan segera follow up, dengan mendatangkan tim surveillance ke Sumbar sebagai tindak lanjutnya. Tambak akan melibatkan masyarakat pesisir pantai, sehingga diharapkan akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat nelayan.
- ✓ Investor Red Chamber Co, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Penjajakan ini untuk investasi budi daya ikan nila di Sumatera Barat, dan mereka bertindak sebagai buyer ekspor produk perikanan Sumatera Barat.
- ✓ Dengan University of Hawaii, di bidang pendidikan dan kebudayaan, akan dilakukan sharing pembiayaan antara pemda dan University of Hawaii untuk ASN yang berminat melanjutkan sekolah S2 dan S3. Peningkatan capacity building bagi guru-guru melalui program dan kegiatan pelatihan dan TOT baik dilakukan di Hawaii maupun di Sumatera Barat. Hal ini menjadi penting dilakukan agar guru dan PNS

Sumatera Barat nantinya akan memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi. Pertukaran mahasiswa antara University of Hawaii, Unand dan UNP serta perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat. Ini diproyeksikan dengan biaya lokal, bukan internasional sehingga tidak memberatkan.

7. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Australia

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Adelaide, Sydney dan Melbourne dilaksanakan dari tanggal 26 s/d 30 November 2017.

Selain mengikuti Kegiatan *Indonesia Australia Business Summit*, Pemerintah Provinsi Sumbar juga bermaksud melakukan kegiatan misi investasi dalam rangka promosi daerah di bidang investasi kepada para pelaku usaha dan investor potensial Australia dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional khususnya Sumatera Barat. Dalam hal ini, Sumatera barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor *renewable energy, micro hydro powerplant, tourism, dan agriculture* yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra yang dilaksanakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney.

Hasil:

House of Indonesia PTY. Ltd, dengan brand trading Eastern Cross Trading (ETC). House of Indonesia merupakan inisiasi penuh dari Ibu Sulyanti yang didukung penuh Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotions Centre (ITPC) Sydney. Beliau mendukung program ini dan sepakat untuk mempromosikan Sumatera Barat yang akan dimulai dengan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

10. Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 48.734.075,- (97,47%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

- ❖ Maksud kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK adalah memfasilitasi terbentuknya kemitraan usaha besar dengan UMKMK dalam bentuk kerjasama yang saling memerlukan, dan menguntungkan sehingga akan meningkatkan daya saing dan UMKMK

dalam memperkuat perekonomian masyarakat Sumatera Barat khususnya dan perekonomian Nasional umumnya.

- ❖ Dan tujuan dari kegiatan ini Kegiatan ini dilaksanakan agar usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi usaha menengah hingga menjadi besar seiring dengan hal tersebut dapat meningkatkan nilai investasi di Sumatera Barat.
- ❖ Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pelaku UMKMK di Kab. Nias dari kegiatan ini adalah Tim dari CV.Bunda/Reffan House. Dari pelaksanaan kegiatan ini terjadinya kesepakatan/MoU antara CV.Bunda/Reffan House selaku Usaha Besar dengan 34 pelaku UMKMK Kota Padang Panjang dan terjadinya kesepakatan/MoU antara CV.Bunda/Reffan House selaku Usaha Besar dengan 36 pelaku UMKMK Kota Solok.
- Keluaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK dengan pengusaha besar untuk 40 orang di Kab. 50 Kota 1 kali pertemuan (sesuai target). Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK sebanyak 3 kesepakatan.

11. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha

dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 47.422.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 46.399.750,- (97,84%). Untuk realisasi fisik tercapai tercapai melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 5 Lol atau sebesar 250%, (target 2 Lol).

- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
 - a. Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti hasil promosi investasi Sumatera Barat.
 - b. Memfasilitasi dunia usaha/calon investor yang berminat terhadap potensi investasi Sumatera Barat ke daerah tempat tujuan rencana investasi. Memfasilitasi peningkatan kerjasama investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.
 - c. Melaksanakan penandatanganan 5 (lima) MoU/Lol
 - Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh keluaran telah terfasilitasinya kerjasama investasi pada 2 sektor, yaitu sektor panas bumi dan sektor pariwisata (sesuai target), dan telah difasilitasi, antara lain:
 1. Mr. William (BBM Mining Capital) dan Mr. Hoanes (BBM Mega Energy) yang melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 Januari 2017 terkait rencana investasi di Kota Padang

dan Kabupaten Padang Pariaman pada bidang Pengolahan Sampah untuk menghasilkan energy.

2. Investor asal Kuwait yang telah melaksanakan kunjungan lapangan ke pulau Marak Kab. Pesisir Selatan dan menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Indonesia pada pertengahan atau akhir tahun 2018. Kunjungan lapangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah Pesisir Selatan dengan Stakeholders terkait untuk memastikan bahwa lahan sudah free, clean and clear.
3. PT. Semen Bosowa Maros yang menyatakan keseriusannya untuk berinvestasi di bidang industri semen di Sijunjung dan bermaksud melakukan peninjauan lapangan pada bulan Januari 2018.

12. Inventarisasi Tanah Ulayat yang berpotensi untuk Penanaman Modal dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 199.373.800,- (99,69%). Untuk realisasi fisik tercapai tercapai melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 6 persil dari 5 persil yang ditargetkan atau sebesar 120%.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

Melakukan pengumpulan dan analisis terhadap tanah-tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi untuk ditawarkan kepada investor sehingga dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi investor selaku pemakai tanah ulayat maupun pemilik tanah ulayat dengan sendirinya.

Tujuan dari Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal ini adalah untuk menyediakan pedoman bagi investor tentang kejelasan lokasi dan status tanah sebagai tempat untuk berinvestasi

- Hasil dari kegiatan ini diperoleh 6 persil dari 5 persil tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal, dimana lokasi ke 6 persil tersebut, adalah:

1. Persil di Jorong Ateh Laban, Nagari Halaban, Kab. 50 Kota untuk **kegiatan Pertambangan.**
2. Persil Guguak Sarai Tinggi di Jorong Guguak Anau, Nagari Guguak Sarai, Kab. Solok **untuk kegiatan Perkebunan.**
3. Persil di Kelurahan Silaing Bawah, Nagari Bukit Surungan, Kota Padang Panjang **untuk Kegiatan Pariwisata.**
4. Persil Talago Aie Tagonang, di Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah, Kab. Tanah Datar **untuk kegiatan Pariwisata.**

5. Persil Talago Aie Pakih, di Jorong Tabek Patah dan Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kab. Tanah Datar **untuk kegiatan Pariwisata.**
6. Persil Panorama Batu Badindiang, di Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kab. Tanah Datar **untuk kegiatan Pariwisata.**

Di dalam pencapaian sasaran ini selain didukung oleh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, juga didukung oleh program dan kegiatan dari kementerian / lembaga dalam hal ini BKPM RI, yaitu kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV Dekonsentrasi dibidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja " Penambahan Realisasi Investasi PMA dan PMDN " adalah sebagai berikut :

1. Peran dan Tanggung jawab perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal di daerahnya sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan PMDN yang sudah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan. Perangkat daerah masih belum maksimal dalam menghimbau dan meningkatkan kesadaran perusahaan penanaman modal di daerahnya untuk memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya sesuai format LKPM;
2. Perusahaan PMA/PMDN sebahagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain ini, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;
3. Baik perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota maupun perusahaan PMA/PMDN sebagian besar masih belum tersosialisasi mengenai LKPM Online sehingga masih banyak perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual, yaitu dengan mengirimkan LKPM melalui Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP, Fax dan Email;
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Usulan pemecahan masalah dalam mencapai indikator kinerja “Penambahan Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu memprioritaskan:

1. Kebutuhan SDM pada bidang pengendalian agar dapat menangani dan memonitor LKPM secara khusus. Jumlah SDM pada bidang teknis dapat secara proporsional terhadap jumlah perusahaan yang dipantau. SDM diharapkan memiliki kemampuan dalam mengevaluasi LKPM sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pusat dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal melalui forum atau pertemuan sebagai wadah komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih mudah dan cepat, dengan demikian diharapkan terjadi persamaan persepsi antara pusat dan daerah terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku.
3. Himbuan kepada perusahaan PMA/PMDN mengenai kewajiban penyampaian LKPM dan periode pelaporan LKPM sebagaimana ketentuan yang berlaku hendaknya dapat melalui metode dan media penyampaian informasi yang lebih banyak berdampak luas dan cepat. Himbuan tersebut dapat dipublikasikan melalui sarana yang lebih optimal seperti media massa (nasional dan daerah), website DPM & PTSP, iklan di stasiun televisi, stasiun radio dan media lainnya.

Selain beberapa hal diatas, agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja sasaran ini perlu difindaklanjuti juga dengan beberapa hal:

1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi yang lebih baik dan ketersediaan energi;
2. Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan mengoptimalkan kinerja tim task force penanaman modal.

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu

Waktu penyelesaian pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal merupakan bagian yang sangat penting dari berbagai faktor pelayanan perizinan seperti faktor tidak ada biaya, penyederhanaan prosedur pelayanan dan faktor lainnya. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan indikator tersebut untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis tersebut di atas. Indikator “*meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu*” diukur berdasarkan persentase dari jumlah izin yang diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dibandingkan dengan jumlah permohonan perizinan yang masuk. Didalam SOP telah diatur bahwa lama waktu penyelesaian perizinan untuk izin prinsip 3 hari, dan izin usaha 7 hari.

Pencapaian sasaran strategis keempat dengan indikator “*persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu*” dan indikator “*indek kepuasan masyarakat (IKM)*” yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu**, dengan capaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis ketiga
(Target Renstra)

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu ▪ IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 	%	80	80,04	100,05
		Rasio	3,3	3,23	97,88

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini dapat dipenuhi dan bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan yakni sebesar 0,4% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100,05%. Perizinan PMA merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 19 (Sembilan belas sektor) Perizinan dan Non Perizinan yang telah didelegasikan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, selama tahun 2017 pada sector bidang penanaman modal dari 13 izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, 11 izin penanaman modal yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan 2 izin tidak sesuai dengan SOP, yakni PT. KEMILAU PERMATA SAWIT dan PT. PEBANA ADI SARANA, hal ini disebabkan karena belum adanya penegasan kewenangan, perizinan/penanaman modal antara BKPM Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemohon Pelaku Usaha dalam Pengisian Form Pendaftaran Yang Kurang Jelas/Memahami, dan Waktu Pengembalian Form Pendaftaran Yang Lambat dikembalikan ke DPM 7 PTSP.

Didalam memberikan pelayanan perizinan kepada investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang *online* dengan BKPM RI, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Secara lengkap daftar perizinan penanaman modal yang diterbitkan PTSP selama tahun 2017, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.9
DAFTAR PERIZINAN/NON PERIZINAN SEKTOR PENANAMAN MODAL
YANG DITERBITKAN DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 217

No	Jenis Permohonan Izin/ Non Izin	Nama dan Alamat Perusahaan/ Pemohon	Nomor Surat Izin Dan Tgl. Pengesahan	Lama Proses di PTSP (hari)	Lama Proses Sesuai SOP (hari)	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1.	Izin Usaha Industri PMDN	PT. Kemilau Permata Sawit	1/13/IU/PMDN/2017 16-01-2017	38 hari	7 hari	Tidak Sesuai
		Talang Kubu Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan				

2.	Izin Prinsip PMDN	PT. Sarana Mitra Saudara Jl. Khaib Sulaiman No. 89 RT.002, RW.006, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang	2/13/IP/PMDN/2017 27-01-2017	3 hari	7 hari	Sesuai
3.	Izin Prinsip PMDN	PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur Jl. Simpang Ampek Manggopoh, Padang Kadok, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat	1/13/IP/PMDN/2017 16-01-2017	1 hari	7 hari	Sesuai
4.	Izin Prinsip Perubahan PMDN	PT. Bumi Sarimas Indonesia Jl. Raya Padang Bukittinggi KM.21 Duku Kabupaten Padang Pariaman	1/13/IP-PB/PMDN/2017 12-01-2017	7 hari	7 hari	Sesuai
5.	Izin Prinsip PMDN	PT. SWARNADWIPA JAYA PRATAMA Jl. Veteran No. 12 C Padang	3/13/IP/PMDN/2017 06-03-2017	3 hari	7 hari	Sesuai
6.	Izin Usaha Industri	PT.RIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR Jl. Simpang Ampek Manggopoh Padang Kadok Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat	2/13/IU/PMDN/2017 06-03-2017	3 hari	7 hari	Sesuai
7.	Izin Prinsip Perubahan PMDN	PT. MULTIKARYA SAWIT PRIMA Gedung Noble House Lantai 11 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 No.2 Sub Blok 6.7 Kawasan Mega Kuningan Ke;. Kuningan Timur Kec. Setia Budi	2/13/IP-PB/PMDN/2017 20-03-2017	6 hari	7 hari	Sesuai
8.	Izin Prinsip PMDN	PT. TIGA PILAR SAKATO Jl. Bypass KM.25 Nag. Kasang Batang Anai Kab. Padang Pariaman	4/13/IP/PMDN/2017 03-08-2017	3 hari	7 hari	Sesuai
9.	Izin Prinsip PMDN	PT. PENINJAUAN SURYA KENCANA Jl. Denpasar Blok D No.23 RT.003 RW.011 Kompl. Asratex Ulak Karang Selatan Padang Utara Kota Padang	5/13/IP/PMDN/2017 16-08-2017	3 hari	7 hari	Sesuai
10.	Izin Usaha Tetap Pertambangan PMDN	PT. PEBANA ADI SARANA Jl. Belanti Raya No. 9 RT.03 RW.04 Kota Padang	3/13/IU/PMDN/2017 18-09-2017	34 hari	7 hari	Tidak Sesuai
11.	Izin Prinsip PMDN	PT. LANCARJAYA MANDIRI ABADI Jl. Raya Naronggong KM.12,5 No.18 Bekasi	6/13/IP/PMDN/2017 29-09-2017	3 hari	7 hari	Sesuai
12.	Izin Usaha Industri	PT. TOYO LITE INDONESIA Kp. Cisititu KM.25,4 RT.002 RW.003 Citatah	4/13/IU/PMDN/2017 21-11-2017	2 hari	7 hari	Sesuai

		Cipatat Kab. Bandung				
13.	Izin Prinsip PMDN	PT. PILAR BAHTERA ENERGI	7/13/IP/PMDN/2017 30-11-2017	3 hari	7 hari	Sesuai
		M. Gold Tower 16 Th Floor Unit F-G Jl. Kh. Nur Ali Bekasi Selatan				

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247 jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.411 izin dan 708 non izin (rekomendasi). Dari 19 sektor yang dilayani, hanya 3 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor Pariwisata, sektor Perumahan Rakyat dan Pertanahan serta sektor Koperasi dan UKM. Rincian perizinan/nonperizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.10
Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

No	Sektor	Jumlah Izin	Jumlah Rekomendasi	Jumlah	SOP (waktu Proses)	Jumlah Izin Sesuai SOP	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penanaman Modal	13	-	13	7 hari	11	84,62
2.	Perindustrian dan Perdagangan	10	11	21	5 hari	19	90,48
3.	ESDM	385	-	385	16 hari	198	51,43
4.	Tenaga Kerja	199	-	199	3 hari	152	79,38
5.	Kesehatan	37	14	51	32 hari	37	72,55
6.	Kehutanan	58	1	59	32 hari	35	59,32
7.	Pendidikan	16	-	16	62 hari	9	56,25
8.	Kelautan dan Perikanan	435	-	435	5 hari	398	91,49

9.	Perkebunan	42	-	42	6 hari	28	66,67
10.	Lingkungan Hidup	-	1	16	92 hari	15	93,75
11.	Pariwisata	171	-	-	6 hari	-	-
12.	Perhubungan	1	88	259	14 hari	221	85,33
13.	Peternakan	4	64	65	4 hari	55	84,62
14.	PU dan Penataan Ruang	10	-	4	17 hari	3	75,00
15.	PSDA	15	-	10	5 hari	-	-
16.	Sosial	-	-	15	10 hari	-	-
17.	Perumahan Rakyat dan Pertanahan	-	-	-	30 hari	-	-
18.	Koperasi dan UKM	-	-	-	10 hari	-	-
19.	Kesbangpol	-	529	529	2 hari	515	97,35
JUMLAH		1.411	708	2.119	-	1.696	80,04

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah izin bidang penanaman modal yang diterbitkan selama tahun 2017 sebanyak 13 izin, lebih sedikit, yaitu 36 Izin atau sebesar 50% dan yang dapat diterbitkan sesuai dengan SOP hanya sebanyak 11 (sebelas) izin atau sebesar 84,62%. Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2011	0	3	-	3 Izin
2012	0	4	-	4 Izin
2013	30	644	2.146,67	631 Izin ; 13 Rekomendasi
2014	400	562	140,50	555 Izin ; 7 Rekomendasi
2015	500	685	137,00	665 Izin ; 20 Rekomendasi

2016	600	1.105	184,17	1.098 Izin; 7 Rekomendasi
2017	1.100	2.119	192,64	1.411 Izin ; 708 Rekomendasi
JUMLAH	2.630	5.122	194,75	4.367 Izin ; 755 Rekomendasi

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Selama Periode tahun 2011 – 2017 jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.122 Izin dan Non Izin dari 19 sektor yang telah dilegaskan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dari 2.630 Izin dan Non Izin yang ditargetkan atau sebesar 194,75%.

Perbandingan realisasi kinerja penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra SKPD 2016 – 2021, seperti tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2016	600	1.105	184,17	1.098 Izin; 7 Rekomendasi
2017	1.100	2.119	192,64	1.411 Izin ; 708 Rekomendasi
JUMLAH	1.700	3.224	189,65	2.509 Izin ; 715 Rekomendasi

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Secara keseluruhan, baik PMA maupun PMDN jumlah perizinan yang telah diterbitkan oleh BKPM RI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan diterima selama tahun 2017 dengan lokasi proyek di Sumatera Barat adalah sebanyak 169 izin dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.16

Tabel 3.13
Rekapitulasi Perizinan PMA/PMDN
(Lokasi Proyek di Sumatera Barat)
Tahun 2017

No.	Jenis Izin	Jumlah	Keterangan (Penerbit Izin)
1	2	3	4
I.	PMA	75	
I.1	Izin Prinsip (IP)	69	
b.	Izin Prinsip (baru)	45	BKPM RI
c.	Izin Prinsip Perluasan	1	BKPM RI
d.	Izin Prinsip Perubahan	23	BKPM RI
I.2	Izin Usaha (IU)	6	
a.	Izin Usaha	6	BKPM RI
b.	Izin Usaha Perluasan	-	
c.	Izin Usaha Perubahan	-	
II.	PMDN	94	
II.1	Izin Prinsip (IP)	89	
a.	Izin Prinsip (baru)	75	BKPM RI, DPM & PTSP Sumbar, DPM & PTSP Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto
b.	Izin Prinsip Perubahan	4	BKPM RI, DPM & PTSP Sumbar
c.	Izin Prinsip Perluasan	10	BKPM RI, DPM & PTSP Kab Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto
II.2	Izin Usaha (IU)	5	
a.	Izin Usaha (Baru)	5	
b.	Izin Usaha Perubahan		
c.	Izin Usaha Perluasan		

Dari izin prinsip baru yang terbit tersebut, bidang usaha yang diminati oleh investor asing adalah: Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Hotel dan Restoran, Sektor Perdagangan dan Reparasi, Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, dan Sektor Peternakan dan Investor asing tersebut berasal dari negara: RR. China, Singapura, Australia, Belanda, Malaysia. Secara lengkap daftar izin prinsip PMA lampiran 6.

Sementara untuk investor dalam negeri, bidang usaha yang diminati adalah Listrik, Gas dan Air, Tanaman Pangan dan Perkebunan, Industri Makanan, Industri Mineral Non Logam, Peternakan, Pertambangan dan Kontruksi. Secara lengkap daftar izin prinsip PMDN dan izin usaha tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8.

Jumlah izin prinsip baik pendaftaran, perluasan dan perubahan pada tahun 2017 sebanyak 169 izin dengan rencana investasi PMA sebesar US\$ 438.001,55 ribu dan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.836 orang, sementara rencana investasi PMDN sebesar Rp. 22.895.433,41 juta dan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.071 orang. Pencapaian ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pencapaian sasaran stratedis ketiga dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan yang diberikan pada tahun 2017 ini, merupakan indikator untuk melihat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu telah dilakukan *survei* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal.

Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan pengumpulan data yang digali dari kuisisioner yang untuk tahun 2017 dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yakni LPM Universitas Bung Hatta. Waktu pengumpulan data responden dengan jumlah responden 100 responden atas 14 substansi unsur pelayanan yang diberikan yang diawancarai secara terstruktur. Berikut adalah tabel nilai rata-rata atas unsur pelayanan yang dinilai, sebagai berikut:

Tabel 3.14
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA_RATA
1	2	3
U1	Prosedur Pelayanan	3.17
U2	Persyaratan Pelayanan	3.24
U3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3.19
U4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3.34
U5	Tanggungjawab Petugas Pelayanan	3.33
U6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.06
U7	Kecepatan Pelayanan	3.12
U8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3.37
U9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.45
U10	Kewajaran Biaya Pelayanan	3.44
U11	Kepastian Biaya Pelayanan	3.14
U12	Kepastian Jadwal Pelayanan	2.97
U13	Kenyamanan Lingkungan	3.30
U14	Keamanan Pelayanan	3.36

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2017

Dari tabel diatas, nilai persepsinya atas unsur pelayanan diatas 3 (tiga), kecuali pada unsur 12 berupa jadwal pelayanan yang masih 2.97. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan aparatur secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang baik.

Hasil penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 berdasarkan penjumlahan nilai rerata tertimbang diperoleh nilai indeks SKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,23. Kalkulasi nilai konversi dari angka IKM tersebut diperoleh angka 80.73, artinya secara terintegrasi dan komprehensif Mutu Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah berada dalam kategori " B " dengan kinerja Unit Pelayanan Publik " Baik ". Hasil Penilaian SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, berpedoman kepada Keputusan Menpan Nomor: KEP/14/M.Pan/2/2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.15
Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2017

Dengan nilai SKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi SKM) 80,73, apabila melihat tabel diatas dapat dikatakan kinerja mutu pelayanan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah "Baik". Jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2016, dengan nilai 78.99 dengan demikian ada peningkatan sebanyak 2,07.

Perbandingan capaian realisasi Indek Kepuasan Masyarakat dengan target yang ditetapkan dari tahun 2015 – 2017, dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.16
Capaian Realisasi IKM dibandingkan Target Tahun 2015-2017

Tahun	Target IKM	Realisasi IKM	% Capaian
1	2	3	4
2015	3,1	3,16	105,33
2016	3,2	3,18	99,38
2017	3,3	3,23	97,88

Disamping itu, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan penilaian kepatuhan kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Dalam penelitian kepatuhan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menilai 12 komponen indikator, mulai dari standar pelayanan, sarana prasarana dan fasilitas, sampai atribut. Penilaian tim Ombudsman terhadap PTSP menggunakan metode penilaian survei. Berdasarkan variabel dan indikator

penilaian tertentu akan diperoleh nilai maksimal/total sebesar 1000 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi berdasarkan perolehan nilai masing-masing Unit Pelayanan Publik pada lembaga tersebut. Kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Zona merah atau kepatuhan rendah (0-500);
- b. Zona kuning atau kepatuhan sedang (501-800); dan
- c. Zona hijau atau kepatuhan tinggi (801-1000).

Berdasarkan penilaian tersebut, pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai total 930 dan masuk dalam kategori **zona hijau** atau **kepatuhan tinggi**. Dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menarik investor dan untuk mensiasati pencapaian standar internasional dalam bidang layanan investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan kinerja mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing dan *image* produk layanan serta selalu berupaya melayani investor sesuai moto PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu **“melayani sepenuh hati”**.

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan yang telah dijabarkan kedalam sasaran strategis ketiga dengan 2 (dua) indikator telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.137.772.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.128.277.628,- (99.17%) sedangkan untuk realisasi fisik atas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampaui realisasinya 2.119 izin/non izin dari 1.100 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 193%, dan untuk penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 80,04% dari target sebesar 80% atau sebesar 100,05% serta indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan tidak sesuai dengan target kinerja sebesar 3,3 realisasinya hanya sebesar 3,23 atau sebesar 97,88%.
 - Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
 - Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat/pelaku usaha/investor/penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE;
6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.

➤ Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) keluaran yaitu:

1. Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2017 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 2.119 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 193% (target: 1.100 izin/rekomendasi).
2. Telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dengan hasil sebesar 3,23 atau sebesar 97,88% (target 3,3).

Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 80.04% atau sebesar 100,05% (target 80%).

b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.890.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.813.758.741,- (95,97%), dan fisik dapat terealisasi sebesar 100%.

➤ Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan dan wawasan aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu

Satu Pintu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik serta menyebarkan informasi mengenai layanan perizinan dan non perizinan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

- ❖ Keluaran dari kegiatan ini adalah Studi teknis terkait peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 60 (enam puluh) orang aparatur DPM & PTSP kab/kota se Sumatera Barat dan 810 (delapan ratus sepuluh) orang aparatur camat, wali nagari, tokoh masyarakat dan pelaku usaha dari 9 (sembilan) kab/kota se Sumatera Barat sebanyak 6 (enam) angkatan.

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman aparatur terkait penyelenggaraan PTSP dan tata cara penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

B. REALISASI ANGGARAN



idalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, mendapat dukungan anggaran dari APBD dan APBN. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.382.080.537,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.598.354.129,- (94,90%). Realisasi anggaran tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.313.730.585,- atau 76,21% dari realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 8.284.623.544,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2017 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2016 dimana serapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 93,37% atau naik sebesar 2,65%.
2. Realisasi anggaran capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2017 sebesar Rp. 9.548.176.924,- atau 96,02% dari anggaran sebesar Rp. 9.943.804.900,-. Realisasi anggaran tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.722.150.910,- atau 347,59% dari realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.221.653.990,-. Serapan anggaran dalam persentase tahun 2017 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2016 dimana serapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 90,35% atau naik sebesar 5,67%.


3. Adapun rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan dalam rangka capaian kinerja keempat sasaran strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.002.606.566,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 960.372.721,- atau sebesar 95,79% yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 636.200.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 628.376.708,- atau sebesar 98,77% yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 31.320.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 31.320.000,- atau sebesar 100% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 360.398.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 350.207.153,- atau sebesar 97,17% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 274.000.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 251.077.900,- atau sebesar 91,63% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
 - f. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset dengan anggaran sebesar Rp. 137.308.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 128.556.033,- atau sebesar 93,63% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
 - g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 4.474.199.834,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 4.256.230.042,- atau sebesar 95,13% terdiri 12 (dua belas) kegiatan;
 - h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu dengan anggaran sebesar Rp. 3.027.772.500,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.942.036.367,- atau sebesar 97,17% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan.
4. Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana dari APBD (Dekonsentrasi) untuk kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal melalui APBN (Dekonsentrasi) dari BKPM RI, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 446.052.340,- (99,12%). Tidak ditemui hambatan dan kendala didalam merealisasikan anggaran.

Terkait dengan realisasi sampai akhir 31 Desember 2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak terealisirnya anggaran belanja sebesar 100% karena adanya efisiensi belanja, hal ini disebabkan antara lain: sisa anggaran pada belanja BBM yang digunakan untuk kegiatan, Belanja Makanan dan Minum Rapat, Honorarium Narasumber Kegiatan serta akomodasinya, sisa belanja Listrik, Air dan telepon pada bulan Desember yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2018;
- Disamping itu tidak keluarnya izin dari Kementerian Luar Negeri terhadap perjalanan dinas luar negeri pada kegiatan penyelenggaraan promosi, yang besaran anggarannya sebesar Rp. 109.885.755,-
- Tidak semua kegiatan yang diusulkan dapat diakomodir pada tahun anggaran 2017 ini, karena plafond anggaran yang diperoleh tidak mencukupi.

BAB IV

PENUTUP

Satu  Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah atas capaian yang diraih selama kurun waktu tahun anggaran 2017 terhadap perjanjian kinerja yang telah disepakati yang merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang ditunjukkan oleh laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat . Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Mengacu pada tiga sasaran strategis yang diturunkan ke dalam 4(empat) indikator kinerja, hampir keseluruhannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan, rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 164,53% yang berarti pencapaian kinerja berhasil. Sementara pada kinerja keuangan, pada tahun 2017 anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.382.080.537,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.598.354.129,- (94,90%). Realisasi anggaran tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.313.730.585,- atau 88,28% dari realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 8.284.623.544,-. Realisasi anggaran capaian kinerja ketiga sasaran strategis tahun 2017 sebesar Rp. 9.548.176.924,- atau 96,02% dari anggaran sebesar Rp. 9.943.804.900,-. Serapan anggaran Belanja Langsung Urusan dalam persentase tahun 2017 ini meningkat dibandingkan serapan tahun 2016 dimana serapan anggarannya sebesar 93,73% atau naik sebesar 2,29%..

Pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan karena adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Diperlukan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society didalam meningkatkan penanaman

modal. Selain itu juga perlu adanya optimalisasi pencapaian kinerja pada indikator “persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu” dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya didalam memberikan pelayanan perizinan, menambah SDM, melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi dan meningkatkan komunikasi dengan BKPM RI terkait SPIPISE, penempatan tim teknis dari OPD Teknis serta pemberian tunjangan khusus kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga lebih fokus pada tupoksinya yang hanya untuk penerbitan perizinan dan non perizinan.

Perlu diupayakan peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pemenuhan kebutuhan SDM pada bidang teknis, khususnya bidang pelayanan dan pengendalian agar dapat melayani investor dengan baik sesuai SOP, serta jumlah SDM pada bidang teknis dapat secara proporsional terhadap jumlah izin sektor yang dikelola dan jumlah perusahaan yang dipantau.
- d. Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pusat dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal (PDKPM) melalui forum atau pertemuan sebagai wadah komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih mudah dan cepat, dengan demikian, diharapkan terjadi persamaan persepsi antara pusat dan daerah terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku.
- f. Himbauan kepada perusahaan PMA/PMDN mengenai kewajiban penyampaian LKPM dan periode pelaporan LKPM sebagaimana ketentuan yang berlaku hendaknya dapat melalui metode dan media penyampaian informasi yang lebih berdampak luas dan cepat, himbauan tersebut dapat dipublikasikan melalui sarana yang lebih optimal seperti media massa (nasional dan daerah), website

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, iklan di stasiun televisi, stasiun radio, dan media lainnya.

- g. Peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengisian LKPM yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan workshop yang lebih fokus kepada penanggung jawab LKPM masing-masing perusahaan penanam modal, perusahaan diarahkan untuk memiliki hak akses LKPM *online* sehingga penyampaian LKPM dapat lebih efektif dan efisien.
- h. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek;
- i. Dukungan terhadap permasalahan investasi yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN dengan melakukan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan mengoptimalkan kinerja tim task force penanaman modal;
- j. Peningkatan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat, disamping itu juga perlu meningkatkan ketersediaan media komunikasi yang memenuhi kebutuhan informasi calon investor dan meningkatkan kualitas bahan materi promosi;
- k. Penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- l. Menekan *high cost economy* yang terjadi karena retribusi atau pungutan-pungutan liar yang memberatkan investor.